

# **ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA ERA OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BOYOLALI**



**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi  
Jurusan Ekonomi Pembangunan Pada Fakultas Ekonomi  
Unirvesitas Sebelas Maret  
Surakarta**

**Disusun Oleh :**

**Agus Setiawan**

**NIM : F1106016**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**2010**

*commit to user*

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi dengan judul :**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA ERA OTONOMI  
DAERAH DI KABUPATEN BOYOLALI**

**Surakarta, 6 Desember 2010**

**Disetujui dan diterima oleh**

**Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sumardi', written over a large, stylized circular mark.

**(Sumardi SE)**

**NIP. 196209081987021004**

**HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI**

Telah disetujui dan diterima dengan baik oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, guna melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat – syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Surakarta, 8 Januari 2011

Tim Penguji Skripsi

1. Drs Wahyu Agung Setyo, MSi  
NIP. 19650522 199203 1 002

2. Sumardi, SE  
NIP. 19620908 198702 1 004

3. Dwi Prasetyani, SE, M. Si  
NIP. 19770217 200312 2 003

(.....)  
Ketua  
(.....)  
Pembimbing  
(.....)  
Anggota

## HALAMAN MOTTO

"Hidup akan lebih berarti jika terus mau berusaha dan berdoa"

**(Penulis)**

"Sesungguhnya Allah SWT tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri"

**(Q.S. Ar Ra'd ; 11)**

"Setiap kesulitan adalah tantangan dan peluang menuju kemudahan yang harus dihadapi"

**(Penulis)**

## HALAMAN PERSEMBAHAN



Karya Ilmiah ini kupersembahkan kepada:

- Allah SWT yang selalu memberikan ridhonya
- Kedua orang tua saya yang telah mensupport selama kuliah
- Kakak-kakakku, Adik-adikku dan seluruh keluarga besar
- Teman-teman EP Non Reg dan INCHA-INCHI community 06
- Sahabatku dan teman-teman TRANSFORMER 16 FC
- Almamaterku

*commit to user*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Karya tulis ini berjudul : “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Era Otonomi Daerah Di Kabupaten Boyolali”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

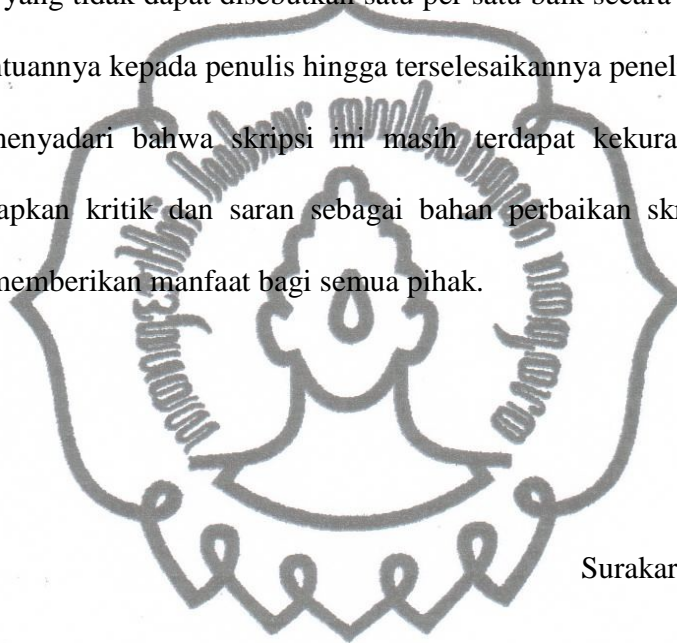
Dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali kendala yang penulis hadapi. Namun berkat arahan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan ketulusan yang mendalam penulis menghaturkan terima kasih kepada :

1. Sumardi, SE, selaku pembimbing yang dengan arif dan bijak telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan memberikan masukan yang berarti dalam penyusunan skripsi ini.
2. Prof. Dr. M.Com, Ak. Bambang Sutopo, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Drs. Kresno Sarosa Pribadi, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Para Petugas BPS dan DPPKAD yang telah melayani dengan baik dalam mencari referensi – referensi atau data-datanya yang dibutuhkan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta beserta staff dan karyawan yang telah memberikan ilmu, bimbingan, arahan dan pelayanan kepada penulis.

*commit to user*

6. Kedua orang tua dan kakak serta keluarga besar yang senantiasa selalu mendoakan, memberi dorongan dan bimbingan kepada penulis.
7. Teman-teman Ekonomi Pembangunan angkatan 2006 Non Reguler dan semua sahabatku TRANSFORMER 16 F.C. terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu baik secara langsung maupun tidak atas bantuannya kepada penulis hingga terselesaikannya penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Penulis mengharapkan kritik dan saran sebagai bahan perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.



Surakarta, 2010

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
 BAB II. LANDASN TEORI	
A. Otonomi Daerah.....	9
1) Pengertian Otonomi Daerah.....	9
2) Landasan Hukum Otonomi Daerah.....	12
3) Maksud dan Tujuan Otonomi Daerah.....	14
4) Titik Berat Otonomi Daerah.....	16
5) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	19
B. Keuangan Daerah.....	23
a. Dimensi Umum Keuangan Daerah.....	23
b. Manajemen dan Prinsip-Prinsip Keuangan Daerah.....	25
c. APBD.....	28
d. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah.....	31



e. Pinjaman Daerah.....	34
f. Indikator Kinerja Keuangan Daerah.....	39
C. Penelitian Terdahulu.....	42
D. Kerangka Pemikiran.....	44
E. Hipotesis.....	45
 BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Ruang Lingkup Penelitian.....	46
B. Jenis dan Sumber Data.....	46
C. Definisi Variabel Operasional.....	47
D. Teknik dan Analisis Data	
1. Analisis Deskriptif.....	49
2. Analisis Kuantitatif.....	50
 BAB IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	58
B. Hasil Analisis dan Pembahasan.....	69
1. Analisis Deskriptif.....	69
2. Analisis Kuantitatif.....	72
 BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	100
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
4.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008 .....	61
4.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008 .....	62
4.3 Penduduk Kabupaten Boyolali Usia Sepuluh Tahun Keatas Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2008.....	62
4.4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Boyolali Tahun 2001-2008 ...	64
4.5 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008 (000) .....	65
4.6 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008 (000).....	66
4.7 Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Boyolali Tahun 2001-2008 (Tahun Dasar 2000 = 100) .....	67
4.8 Analisis Surplus/Defisit APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008 Menurut Pendekatan Dasar (PP No. 5 Tahun 2005)...	69
4.9 Analisis Surplus/Defisit APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008 Menurut (PMK No. 72 Tahun 2006) .....	70
4.10 Kontribusi PAD Terhadap APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008.....	71
4.11 Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008 .....	73

4.12	Pertumbuhan PAD dan PDRB Kabupaten Boyolali	
	Tahun 2002-2008 .....	75
4.13	Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008...	76
4.14	Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008....	77
4.15	Rasio Pengumpulan Pajak Kabupaten Boyolali	
	Tahun 2002-2008 .....	79
4.16	Rasio Pengumpulan Retribusi Kabupaten Boyolali	
	Tahun 2002-2008 .....	80
4.17	Pertumbuhan Pajak Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008 .....	81
4.18	Pertumbuhan Retribusi Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008 ...	82
4.19	Kontribusi Pajak Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008 .....	83
4.20	Kontribusi Retribusi Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008.....	84
4.21	Matrik Potensi Jenis Pajak dan Retribusi Daerah.....	85
4.22	Matrik Potensi Pajak Kabupaten Boyolali .....	86
4.23	Matrik Potensi Retribusi Kabupaten Boyolali .....	87
4.24	Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah.....	89
4.25	Tingkat Kemandirian, Kemampuan Keuangan dan Pola	
	Hubungan Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008 .....	89
4.26	Jumlah Kumulatif Pokok Pinjaman Daerah Kabupaten	
	Boyolali Tahun 2002-2008.....	91
4.27	DSCR Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008.....	93
4.28	Jumlah Maksimal Angsuran Pokok Pinjaman Kabupaten	
	Boyolali Tahun 2002-2008.....	94

## DAFTAR LAMPIRAN

- 4.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Jenis Kelamin  
di Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008
- 4.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kelompok Umur  
di Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008
- 4.4 Penduduk Kabupaten Boyolali Usia Sepuluh Tahun Keatas  
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2008
- 4.4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Boyolali Tahun 2001-2008
- 4.5 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku  
Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008 (000)
- 4.6 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan  
Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008 (000)
- 4.7 Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Boyolali Tahun  
2001-2008 (Tahun Dasar 2000 = 100)
- 4.8 Analisis Surplus/Defisit APBD Kabupaten Boyolali Tahun  
2002-2008 Menurut Pendekatan Dasar (PP No. 5 Tahun 2005)
- 4.9 Analisis Surplus/Defisit APBD Kabupaten Boyolali Tahun  
2002-2008 Menurut (PMK No. 72 Tahun 2006)
- 4.10 Kontribusi PAD Terhadap APBD Kabupaten Boyolali Tahun  
2002-2008
- 4.11 Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Boyolali  
Tahun 2002-2008

- 4.12 Pertumbuhan PAD dan PDRB Kabupaten Boyolali  
Tahun 2002-2008
- 4.13 Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008
- 4.14 Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008
- 4.15 Rasio Pengumpulan Pajak Kabupaten Boyolali  
Tahun 2002-2008
- 4.16 Rasio Pengumpulan Retribusi Kabupaten Boyolali  
Tahun 2002-2008
- 4.17 Pertumbuhan Pajak Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008
- 4.18 Pertumbuhan Retribusi Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008
- 4.19 Kontribusi Pajak Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008
- 4.20 Kontribusi Retribusi Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008
- 4.21 Matrik Potensi Jenis Pajak dan Retribusi Daerah
- 4.22 Matrik Potensi Pajak Kabupaten Boyolali
- 4.23 Matrik Potensi Retribusi Kabupaten Boyolali
- 4.24 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah
- 4.25 Tingkat Kemandirian, Kemampuan Keuangan dan Pola  
Hubungan Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008
- 4.27 Jumlah Kumulatif Pokok Pinjaman Daerah Kabupaten  
Boyolali Tahun 2002-2008
- 4.27 DSCR Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008
- 4.28 Jumlah Maksimal Angsuran Pokok Pinjaman Kabupaten  
Boyolali Tahun 2002-2008

## **ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA ERA OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BOYOLALI**

### **ABSTRAK**

Agus Setiawan

F1106016

Hal yang menunjukkan suatu daerah mampu menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab yaitu dengan melihat kemampuan daerah dalam menggali sumber keuangan sendiri dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan kuantitatif. Indikator yang digunakan dalam menganalisis adalah Analisis Surplus/Defisit APBD, DDF, DOF, Upaya Fiskal, Rasio Efektivitas, Indeks Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah serta Rasio Kemandirian Daerah. Data yang digunakan adalah data sekunder dari instansi pemerintah terkait, yaitu tentang target dan realisasi APBD tahun 2002-2008.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan dari tahun 2002-2008 pendapatan daerah menurut PP No. 5 Tahun 2005 Kabupaten Boyolali terus meningkat, tetapi di tahun 2003, 2007 dan 2008 juga dibarengi dengan meningkatnya pengeluaran daerah sehingga pada tahun tersebut terjadi defisit anggaran. Sedangkan menurut PMK No. 72 Tahun 2006 Kabupaten Boyolali tahun 2002-2008 mengalami surplus anggaran. Dari kedua pendekatan tersebut dapat dikatakan Pemerintah Daerah Boyolali tidak melanggar peraturan APBD, karena APBD mengalami surplus dan jumlah defisitnya tidak lebih 5% dari total pendapatan. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa Kabupaten Boyolali secara keuangan belum mampu mandiri, hal ini dapat dilihat dari rendahnya proporsi PAD terhadap TPD dari tahun 2002-2008 reratanya sebesar  $9,07\% < 50\%$ . Dilihat dari Rasio Kemandirian Daerah dan Kemampuan Pinjaman Daerah Boyolali hasil rerata Rasio Kemandirian rerata sebesar 10,56% dengan begitu Kabupaten Boyolali memiliki pola hubungan yang instruktif atau rendah sekali, sedangkan Kemampuan Pinjaman rerata sebesar 684,95% dari batas minimal 2,5 dikatakan Kabupaten Boyolali belum bisa memanfaatkan sumber penerimaan yang berasal dari pinjaman daerah. Hal ini menyebabkan ketergantungan finansial pemerintah daerah masih tinggi terhadap pemerintah pusat.

Dari hasil penelitian secara umum, menunjukkan bahwa kinerja atau kemampuan keuangan daerah Kabupaten Boyolali masih sangat rendah atau belum mandiri dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dari semua hasil tersebut diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Boyolali lebih mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan seperti pajak dan retribusi daerah untuk



meningkatkan PAD, perbaikan kinerja BUMD yang lebih profesional dan Mengoptimalkan pinjaman daerah sebagai sumber penerimaan daerah yang digunakan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan Kabupaten Boyolali dapat mengurangi ketrgantungan finansial dari pemerintah pusat.

Kata Kunci: *analisis surplus/defisit APBD, DDF, DOF, upaya fiskal, rasio efektivitas, indeks kinerja pajak dan retribusi, rasio kemandirian, kemampuan pinjaman.*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang Masalah

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat ekonomi lemah berupa ketimpangan ekonomi. Adanya ketimpangan ekonomi tersebut membawa Indonesia untuk melakukan reformasi di segala bidang. Pergantian pemerintah orde baru ke orde reformasi tersebut dimulai pada tahun 1998 dan aspek pemerintahan merupakan salah satu aspek reformasi yang dominan. Aspek pemerintahan tersebut adalah aspek hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Isu yang muncul dari aspek ini adalah adanya tuntutan ekonomi yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab yang harus diberikan kepada pemerintah daerah. Reformasi pada aspek pemerintahan semakin membuat masalah otonomi daerah menjadi komoditas yang laku di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan bahwa otonomi daerah yang didinginkan tersebut akan dilaksanakan dalam waktu dekat (Abdul Halim, 2004:15). Disamping dampak negatif dari krisis ekonomi pertengahan tahun 1997 juga terdapat dampak yang berkonotasi positif seperti meningkatnya nilai ekspor komoditi karena naiknya nilai dollar Amerika Serikat terhadap nilai rupiah. Namun, dampak krisis lebih banyak berkonotasi negatif seperti naiknya pengangguran dan kemiskinan.



Lebih jauh, dampak krisis ekonomi terjadi pula pada sektor APBN yakni menjadi labilnya sektor pendapatan pemerintah pusat yang pada gilirannya akan mempengaruhi APBD. Hal ini terjadi karena alokasi dana APBN untuk APBD menjadi labil pula. Dengan kata lain faktor ketidakpastian penerimaan pendapatan daerah dari pemerintah pusat sebagai bagian dari hubungan keuangan pusat dan daerah menjadi lebih tinggi. Kondisi ini lebih parah lagi untuk pemerintah daerah yang tingkat PAD nya rendah. Padahal, sumbangan PAD cukup penting bagi pemerintah daerah dalam mendukung dan memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang (Mamesah, 1995: hal. 93).

Selama masa orde lama dan orde baru, pemerintahan indonesia mengalami sistem pemerintahan yang sentralistik yang memberi dampak negatif terhadap pembangunan. Dampak negatif sentralisasi tersebut sangat membatasi kreativitas daerah untuk mengembangkan potensi daerah sesuai dengan keinginan masyarakat daerah. Selain itu, sentralisasi telah menyebabkan pemerintah daerah semakin kuat ketergantungannya terhadap pemerintah pusat. Kedua hal tersebut cukup membuat pemerintah daerah tidak berdaya membangun daerahnya.

Era reformasi saat ini memeberikan peluang bagi perubahan paradigma nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini diwujudkan melalui kebutuhan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang ditetapkan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah

daerah dan UU No. 33 tahun 2004 pengganti dari UU No. 25 tahun 1999 tentang pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang banyak terjadi perubahan kebijakan daerah. Kedua UU ini merupakan landasan utama bagi desentralisasi pemerintahan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan desentralisasi kewenangan dan keuangan desentralisasi. Secara teoritis desentralisasi ini diharapkan akan menghasilkan 2 manfaat yaitu mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa serta kreativitas masyarakat dalam pembangunan dan mendorong pemerataan hasil pembagian. Kemudian memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ketingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi lengkap (Mardiasmo, 2002 : 6).

Berkaitan dengan hakekat otonomi daerah tentang pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka peran data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data tersebut merupakan informasi yang penting dalam membuat kebijakan serta melihat tingkat kemampuan daerah.

Untuk meningkatkan pembangunan, pemerintah daerah otonom berkewajiban untuk mencari alternatif pembiayaan lain dari sumber pembiayaan pemerintah pusat. Sumber pembiayaan tersebut diperoleh dengan

melakukan pinjaman daerah. Karena kecilnya PAD dibanding dengan kebutuhan daerah untuk pembangunan, maka dalam beberapa pemerintah daerah memerlukan pinjaman untuk digunakan pada proyek-proyek yang dapat menghasilkan pendapatan (Kunarjo, 1996).

Penggunaan pinjaman sebagai sumber pembiayaan merupakan salah satu bentuk kewenangan bagi pemerintah daerah, namun sampai saat ini pinjaman daerah masih dikendalikan oleh pemerintah pusat. Ada tiga faktor utama yang menyebabkan pinjaman pemerintah daerah masih dikendalikan oleh Pemerintah Pusat (Devas et al 1989: 22). *Pertama*, pinjaman sektor pemerintah secara keseluruhan perlu dikendalikan, karena berkaitan dengan kebijaksanaan moneter terutama untuk mengendalikan inflasi. *Kedua*, untuk mencegah pemerintah daerah agar tidak terjerumus dalam kesulitan keuangan, karena pinjaman digunakan untuk menutupi pengeluaran rutin. *Ketiga*, pemerintah pusat ingin tetap mengendalikan pola pengeluaran penanaman modal pemerintah daerah. Selain itu, ada juga empat faktor secara keseluruhan penyebab tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Mudarajad Kuncoro, 2004: 13), yaitu :

1. Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan.
2. Kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
3. Kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa dijadikan sebagai pendapatan daerah.

4. Ada yang khawatir jika daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme.

Sebagai solusi dari permasalahan diatas, alternatif yang ditawarkan (Mudrajad Kuncoro, 2004: 15) yaitu:

1. Meningkatkan peran BUMD.
2. Meningkatkan penerimaan daerah.
3. Meningkatkan pinjaman daerah.

Implementasi pelaksanaan otonomi daerah akan dapat berjalan lancar jika memperhatikan 5 kondisi strategis berikut ; (1) self regulating power yaitu kemampuan mengatur dan melaksanakan otonomi daerah untuk kepentingan masyarakat, (2) self modifying power berupa kemampuan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah ditetapkan secara nasional sesuai kondisi daerah termasuk terobosan inovatif kemajuan dalam menyikapi potensi daerah, (3) creating local political support yaitu penyelenggaraan pemerintah daerah yang mempunyai legitimasi kuat dari masyarakat, baik kepala daerah sebagai eksekutif maupun DPRD sebagai kekuasaan legislatif, (4) managing financial resource yaitu mengembangkan kompetensi dalam mengelola secara optimal sumber penghasilan dan keuangan untuk membiayai aktivitas pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik, (5) developing brain power dalm arti membangun SDM yang handal dan selalu bertumpu pada kapabilitas penyelesaian masalah (Rasyid dan Paragoan dalam Fatima Zahra: 2008).

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi menurut Bratakusumah dan Solihin (2001: 169), untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintah daerah.

Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan suatu daerah dalam bidang keuangan. Keuangan daerah merupakan salah satu aspek yang penting dari pembangunan ekonomi daerah. Dalam hal ini dimana caranya daerah tersebut dapat menciptakan sumber pendapatan dan penerimaan daerah sendiri tanpa tergantung dari pemerintah pusat yang akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pemberian pelayanan publik apakah berjalan secara efektif dan efisien atau tidak.

Kabupaten Boyolali merupakan kabupaten yang berada di provinsi Jawa Tengah yang dalam pembangunannya tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, namun disesuaikan dengan permasalahan di daerahnya serta didasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka penulisan skripsi ini mengambil judul **“Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Era Otonomi Daerah Di Kabupaten Boyolali”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Boyolali pada era otonomi daerah diukur dengan indikator analisis surplus/defisit APBD, DDF (Derajat Desentralisasi Fiskal), DOF (Derajat Otonomi Fiskal), upaya fiskal, rasio efektivitas serta indeks kinerja pajak dan retribusi daerah dan pola hubungannya?
2. Bagaimana kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Boyolali pada era otonomi daerah jika diukur dengan RKK (Rasio Kemandirian Keuangan Daerah) dan pola hubungannya?
3. Bagaimana kapasitas pinjaman daerah Boyolali pada era otonomi daerah dihitung dengan Jumlah Kumulatif Pokok Pinjaman dan DSCR (Debt Service Coverage Ratio).



### C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui potensi atau kemampuan keuangan daerah Kabupaten Boyolali pada era otonomi daerah.
2. Menilai kemandirian keuangan daerah Kabupaten Boyolali pada era otonomi daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah yang diukur dengan RKK (Rasio Kemandirian Keuangan Daerah) dan pola hubungannya.
3. Mengukur kapasitas pinjaman daerah Kabupaten Boyolali pada era otonomi daerah.

### D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas diperoleh manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Dapat membantu pemberian masukan bagi pemerintah daerah mengenai ekonomi perencanaan regional.
2. Dapat sebagai referensi kepada pihak yang terkait yang berkepentingan dalam hal kinerja keuangan daerah.
3. Sebagai bahan acuan dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya tentang kinerja keuangan daerah.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Otonomi Daerah

##### 1) Pengertian Otonomi Daerah

Di dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tepatnya pasal 1, dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah memiliki makna sebagai pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sedangkan di dalam negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi, dikenal adanya struktur pemerintah pusat (*central government*) dan daerah-daerah tersebut memiliki hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang juga disebut dengan otonomi. Kata otonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, *Autos* yang berarti sendiri dan *Nomos* yang berarti aturan.

Adisubrata mengatakan, bahwa otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat pada negara kesatuan maupun pada negara federasi. Di negara kesatuan otonomi daerah lebih terbatas daripada di negara yang berbentuk federasi.

*commit to user*



Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga daerah di negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintahan pusat seperti: 1) Hubungan Luar Negeri, 2) Pengadilan, 3) Moneter dan Keuangan, 4) Pertahanan dan Keamanan. Pernyataan di atas disebut otonomi luas, sedangkan di negara federal negara bagian melaksanakan otonomi yang lebih luas karena negara bagian dapat mengurus peradilan dan keamanan sendiri.

Dalam literatur pemerintahan dikenal 3 sistem otonomi yaitu:

- a. **Otonomi formil** yaitu suatu sistem otonomi dimana yang diatur adalah kewenangan-kewenangan pemerintah pusat yang dipegang oleh pemerintah pusat, seperti pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, peradilan dan moneter fiskal dan kewenangan lainnya. Sedangkan kewenangan daerah otonom adalah kewenangan yang diluar kewenangan pemerintah pusat tersebut.
- b. **Otonomi materiil** yaitu kewenangan-kewenangan daerah otonom yang dilimpahkan oleh eksplisit disebutkan satu persatu (diatur dalam UU Pembentukan Daerah Otonom). Sedangkan kewenangan daerah otonom adalah kewenangan yang diluar kewenangan pemerintah tersebut.
- c. **Otonomi riil** yaitu kewenangan-kewenangan daerah otonom yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat, disesuaikan dengan kemampuan nyata dari daerah otonom yang bersangkutan seperti SDM. Pendapatan daerah, PDRB dll. Jadi kewenangan daerah otonom yang satu dengan daerah otonom lainnya tidak sama.

Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan pusat dan daerah serta potensi dan keanekaragamannya. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem negara kesatuan republik indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan persaingan global dengan pemanfaatan perkembangan IPTEK. Agar mampu menjalankan perannya tersebut daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Disamping itu, diberikan standar pemantauan dan evaluasi. Selain itu pemerintah juga wajib memberikan fasilitas yang berupa pemberian peluang kemudahan bantuan dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan perundang-undangan (penjelasan umum UU No. 32 tahun 2004).

## 2) Landasan Hukum Otonomi Daerah

Otonomi daerah sebagai perwujudan sistem penyelenggaraan pemerintah yang berdasarkan asas desentralisasi yang diwujudkan agar otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab dilaksanakan dalam NKRI yang telah diatur dalam kerangka landasannya di dalam UUD 1945 antara lain: (i) Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. (ii) Pasal 18 yang menyatakan: “Pemerintahan daerah dibentuk atas dasar pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunannya ditetapkan dengan UU, dengan memandang dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintah negara dan hak-hak, asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.” (Bachrul Elmi, 2002:3). Jadi UUD 1945 adalah landasan yang paling kuat tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan SDN yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangka NKRI.

Penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Hal-hal yang mendasar dalam UU ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah (Winarna Surya Adisubrata, 2002:148).

Prinsip-prinsip dasar otonomi daerah yang juga dijadikan sebagai pedoman dalam UU 22/1999 antara lain:

- Penyelenggaraan otonomi daerah berlandaskan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
- Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
- Pelaksanaan otonomi daerah tersebut terletak pada daerah Kabupaten dan daerah Kota, sedang otonomi daerah Provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
- Kemandirian daerah otonom.
- Peningkatan peranan dan fungsi Badan Legislatif Daerah.
- Dekonsentrasi terletak pada Pemerintah Daerah Provinsi.

Dari sisi sejarah perkembangannya penyelenggaraan pemerintah di daerah, telah dikeluarkan berbagai aturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan UU tentang pemerintah daerah yang hanya mengatur pelaksanaan asas desentralisasi ini dibuat pertama kali tahun 1948. Sejalan perlunya dilakukan reformasi di sektor publik, saat ini telah dikeluarkan juga peraturan pemerintah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi antara lain:

1. Peraturan Pemerintah No. 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan yang diperbaharuidengan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

2. Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Tugas Pembantuan.
4. Peraturan Pemerintah No. 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
5. Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
6. Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
7. Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

### 3) Maksud dan Tujuan Otonomi Daerah

Menurut UUD negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi yang berwujud desentralisasi dan

*commit to user*

tugas pembantuan. Asas desentralisasi pemberian otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI.

Dalam hal untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara pusat dan daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintahan.

Ada 2 alasan yang mendasari pemberian otonomi luas dan desentralisasi (Mardiasmo, 2002:66) yaitu:

- a. Intervensi pemerintah pusat pada masa lalu yang terlalu besar telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah.
- b. Tuntutan ekonomi muncul sebagai jawaban memasuki era *new game* yang membawa *new rules* pada semua aspek kehidupan di masa mendatang.



Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung 3 misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (Mardiasmo, 2002:59), yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
- 3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat atau publik untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

#### 4) Titik Berat Otonomi Daerah

Titik berat otonomi daerah yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan daerah di letakkan pada daerah tingkat II atau kabupaten, dengan pertimbangan sebagai berikut: 1) dari dimensi politik, dari II dipandang kurang mempunyai fanatisme

kedaerahan sehingga resiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim. 2) dari dimensi administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif. 3) dari II adalah daerah “ujung tombak” pelaksanaan pembangunan sehingga dari II lah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. Atas dasar itulah prinsip otonomi yang dianut, yaitu otonomi yang nyata, bertanggung jawab dan dinamis diharapkan dapat lebih mudah direalisasikan. “Nyata” berarti otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi obyektif di daerah, “Bertanggung jawab” mengandung arti pemberian otonomi diselenggarakan atau diupayakan untuk memperlancar pembangunan diseluruh pelosok tanah air. “Dinamis” berarti pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju (Mudrajad Kuncoro, 2004:3).

Penyelenggaraan otonomi daerah dengan menitik beratkan pada daerah kabupaten adalah merupakan suatu kebutuhan yang harus didukung artinya daerah kabupaten akan menjadi basis penyelenggaraan otonomi daerah. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah kebijakan ini apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Ada beberapa pertimbangan sebagai dasar penetapan daerah Kabupaten/Kota sebagai titik berat pelaksanaan otonomi daerah (Mudrajad Kuncoro 1995:4).



- a. Dari dimensi politik, daerah kabupaten/kota kurang punya fanatisme kedaerahan sehingga resiko separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi masyarakat federasi secara relayif bisa merugikan.
- b. Dari dimensi administratif, penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif.
- c. Daerah kabupaten/kota merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan sehingga daerah kabupaten/kota yang lebih mengetahui potensi rakyat di daerahnya.

Otonomi daerah dengan titik berat pada daerah Kabupaten atau Kota mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

- a. Untuk memungkinkan daerah mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sehingga daerah secara kreatif dapat membina dan mengembangkan kemampuan organisasi, aparatur dan sumber-sumber keuangannya secara optimal.
- b. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan melalui perluasan jenis pelayanan dalam berbagai bidang kebutuhan publik.
- c. Untuk menumbuhkan kemandirian daerah. Pemerintah dan masyarakat perlu membangun usaha bersama yang mampu memberikan daya saing bagi daerah dalam pertumbuhannya yang secara nyata berjalan bersama-sama dengan daerah-daerah lain.

- d. Untuk dapat mengembangkan mekanisme demokrasi di tingkat daerah, dengan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- e. Untuk mendukung pengembangan perekonomian daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki dan perluasan kewenangan birokrasi lokal.

### 5) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti yang dijelaskan pada penjelasan UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang membariakan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip ketrbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Hakekat suatu negara dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan yaitu mengemban 3 fungsi,

*commit to user*

fungsi alokasi yang meliputi sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat, fungsi distribusi meliputi pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan dan fungsi stabilisasi yang meliputi pertahanan-keamanan, ekonomi dan moneter. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah pusat sedangkan fungsi alokasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena daerah pada umumnya lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat (Winarna Surya Adisubrata, 2002:218).

Sesuai dengan ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 bahwa ada urusan pemerintahan yang menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan, urusan tersebut meliputi politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter, yustisi dan agama, urusan tertentu pemerintah yang berskala nasional yang tidak diserahkan kepada daerah.

Keserasian hubungan yang disebut juga pengelolaan bagian urusan pemerintahan yang dikerjakan oleh tingkat pemerintah yang berbeda, bersifat saling berhubungan (interkoneksi), saling tergantung (interdependensi) dan saling mendukung sebagai satu kesatuan sistem dengan memperlihatkan cakupan kemanfaatannya. Urusan yang menjadi kewenangan daerah ada 2 urusan yaitu a) Urusan wajib adalah suatu urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar, b) Urusan pilihan adalah urusan pemerintah

daerah yang bersifat berkaitan dengan potensi daerah dan kekhasan daerah.

Dalam pelaksanaannya tidak semua urusan pemerintah dapat diserahkan kepada daerah. Pemerintah pusat berat untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah di daerah yang masih menjadi wewenang dan tanggung jawabnya itu atas dasar asas dekonsentrasi mengingat terbatasnya kemampuan aparatur pemerintah pusat. Maka, dari itu urusan pemerintah daerah dapat dilakukan menurut asas tugas pembantuan yang pada dasarnya merupakan keikutsertaan daerah atau penugasan dari pemerintah pusat atau daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang tertentu.

Di samping itu terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat *concurrent* artinya urusan pemerintah yang penanganannya dalam bagian tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dengan daerah. Dengan demikian setiap urusan yang bersifat *concurrent* selalu ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, ada yang diserahkan kepada provinsi, dan ada yang diserahkan kepada kabupaten kota.

Untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang *concurrent* secara proporsional antara pemerintah, daerah provinsi, daerah kabupaten kota maka, disusunlah tiga kriteria dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintah antar tingkat pemerintah yang meliputi (Baban Sobandi et. Al, 2006:104-105):

- a. Kriteria Eksternalitas ialah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan kabupaten kota. Apabila dampaknya regional, maka menjadi kewenangan provinsi dan apabila dampaknya nasional, maka menjadi kewenangan pemerintah.
- b. Kriteria Akuntabilitas ialah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani suatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih langsung dekat dengan dampak akibat urusan yang ditangani tersebut. Dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan tersebut kepada masyarakat akan lebih terjamin.
- c. Kriteria Efisiensi ialah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya (personil, daya, peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan. Untuk itu pembagian urusan harus disesuaikan dengan memperhatikan ruang lingkup wilayah beroperasinya bagian urusan pemerintahan tersebut. Ukuran daya guna dan hasil guna tersebut dilihat dari besarnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan besar kecilnya resiko yang dihadapi.

## B. Keuangan Daerah

### 1) Dimensi Umum Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD (Bab 1, Pasal 1, Ayat 5 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005).

Pelaksanaan otonomi daerah membawa perubahan pada pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya dan pengelolaan APBD pada khususnya yang sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 105/2000 dikemukakan asas umum pengelolaan keuangan daerah yang meliputi:

- 1) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku efisien, efektif dan bertanggung jawab.
- 2) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dicatat dalam APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD.
- 3) Daerah dapat membentuk dana cadangan.
- 4) Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lainnya, selain sumber pembiayaan yang telah ditetapkan seperti kerja sama dengan pihak lain.
- 5) Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah diatur dalam peraturan daerah oleh APBD disusun dengan pendekatan kinerja.

*commit to user*



Peraturan pemerintah tersebut sudah memberikan arahan secara umum kepada pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan APBD. Disamping itu, daerah dituntut lebih terampil dalam proses penyusunan maupun dalam pelaksanaan APBD dengan menggunakan pendekatan kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya input yang ditetapkan (Penjelasan PP No. 105/2000). Hal ini juga berarti bahwa hal yang dicapai harus sepadan atau lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Disamping itu, setiap penganggaran dalam pos pengeluaran APBD harus didukung oleh adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Penyelenggaraan keuangan daerah akan berjalan dengan baik dan optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Besarnya alokasi sumber-sumber penerimaan daerah tersebut disesuaikan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta mengacu pada UU tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Semua sumber-sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah menjadi sumber keuangan daerah (Penjelasan Umum UU No. 32 Tahun 2004).

## 2) Manajemen dan Prinsip-Prinsip Keuangan Daerah

Pada era globalisasi pada saat ini, menekankan pelaksanaan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Untuk mendukung pelaksanaan tersebut, maka diperlukan anggaran baru yang berkaitan dengan manajemen keuangan daerah yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan yang dibagi menjadi manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah.

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 4, prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Efisien yaitu pencapaian keluaran maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- b. Ekonomis yaitu perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- c. Efektif yaitu pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- d. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- e. Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

*commit to user*



- f. Tertib adalah tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- g. Taat pada peraturan perundang-undangan adalah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.
- i. Kepatuhan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajardan proporsional.
- j. Manfaat adalah keutamaan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Melihat prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah di atas, bahwa pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, transparan, efisien dan efektif agar berjalan dengan lancar, maka dapat dipenuhi dengan kriteria seagai berikut: (Mardiasmo, 2002:106).

- a. Anggaran daerah bertumpu pada kepentingan publik.
- b. Anggaran daerah dikelola dengan hasil yang baik dan biaya yang rendah (work better and cost less).
- c. Anggaran daerah mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara nasional untuk keseluruhan siklus anggaran.
- d. Anggaran daerah dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan.
- e. Anggaran daerah mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait.

- f. Anggaran daerah dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperlihatkan prinsip value for money.

Pelaksanaan otonomi daerah juga membawa perubahan pada pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan pengelolaan APBD pada khususnya. Dalam PP No. 58 Tahun 2005 bab 1 pasal 4, dikemukakan asas-asas pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:

- a. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.
- b. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan peraturan daerah.

Pada dasarnya prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah tersebut harus senantiasa dipegang teguh dan dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik. Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga dilihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah.

### 3) APBD

Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijaksanaan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Selanjutnya anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu. Ketentuan ini berarti bahwa APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Dari semua itu, pemungutan semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah (Bratakusumah dan Solihin, 2002:209).

APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya

atau input yang ditetapkan. Dalam penyusunan APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Tahap-tahap proses penyusunan APBD adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan umum APBD antara pemerintah daerah dan DPRD dengan mempertimbangkan aspirasi dan masukan masyarakat.
- b. Penyusunan strategi dan prioritas oleh pemerintah daerah.
- c. Penyusunan RAPBD yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- d. Pembahasan RAPBD yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama DPRD.
- e. Penetapan RAPBD dengan peraturan daerah.
- f. Apabila DPRD tidak menyetujui RAPBD yang diusulkan, maka dipergunakan APBD tahun sebelumnya.
- g. Perubahan RAPBD ditetapkan paling lambat 3 bulan.

Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005, pasal 20 ayat 1 disebutkan bahwa struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan. Yang dimaksud dengan satu kesatuan dalam hal ini adalah bahwa dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja dan sumber-sumber pembiayaannya (Bratakusumah dan Solihin, 2002:212).

- a. Pendapatan Daerah, dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan. Kelompok pendapatan meliputi PAD, Dana Perimbangan

dan Lain Pendapatan yang sah. Jenis pendapatan meliputi Pajak Daerah, Retribusi, DAU dan DAK.

b. Belanja Daerah, dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

Yang dimaksud belanja menurut organisasi adalah suatu kesatuan pengguna anggaran seperti DPRD dan sekretariat DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, serta dinas daerah dan lembaga teknis daerah lainnya. Fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan, dan fungsi-fungsi lainnya. Jenis belanja maksudnya adalah belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja modal/pembangunan.

c. Pembiayaan, dirinci menurut sumber pembiayaan. Sumber-sumber pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah antara lain seperti sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi serta penerimaan dan penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran antara lain seperti pembayaran hutang pokok.

Dalam rangka mengelola keuangan, daerah dapat membentuk dana cadangan yang bersumber dari pemerintah daerah guna membiayai kebutuhan tertentu. Dana cadangan dapat disediakan dari sisa anggaran tahun lalu/sumber pendapatan daerah. Dana cadangan dibentuk dan diadministrasikan secara terbukti tidak dirahasiakan, disimpan dalam bentuk kas atau yang mudah diuangkan dan semua transaksi harus dicantumkan dalam APBD.

APBD mempunyai fungsi utama, yaitu (UU No. 33 Tahun 2004, Pasal 66 ayat 3):

- a. Fungsi Otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- b. Fungsi Perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi Pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Fungsi Alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi Distribusi, mengandung arti bahwa kebutuhan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

#### **4) Sumber-sumber Pendapatan Daerah**

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 sebagai pengganti dari UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, bahwa sumber-sumber penerimaan daerah terdiri atas:



#### a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD ini di dapat dari berbagai sumber-sumber sebagai berikut:

##### 1) Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh seorang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa balas jasa langsung yang ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### 2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan-pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

##### 3) Hasil Perusahaan Milik Daerah.

##### 4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

##### 5) Sumber-Sumber lain Pendapatan yang sah.

Meliputi (i) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, (ii) jasa giro, (iii) pendapatan bunga, (iv) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan (v) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengelolaan barang/jasa oleh daerah.

*commit to user*

#### b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sumber-sumber dana yang berasal dari pos dana perimbangan antara lain:

##### 1) Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka prosentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

##### 2) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

##### 3) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pemerintah menetapkan kriteria dalam pengalokasian DAK, yaitu:

- Kriteria umum, ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD.

- Kriteria khusus, ditetapkan dengan memperhatikan perundang-undangan dan karakteristik daerah.
- Kriteria teknis, ditetapkan dengan memperhatikan perkiraan manfaat lokal dan nasional yang menjadi indikator dalam perhitungan teknis.

c. Lain-lain pendapatan yang sah

1) Hibah

Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintahan negara asing, lembagaasing, lembaga internasional pemerintah, badan/lembaga dalam negeri/perorangan baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang/jasa termasuk tenaga ahli dan penelitian yang tidak perlu dibayar kembali.

2) Pendapatan Dana Darurat

Pendapatan Dana Darurat adalah dana yang bersal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional atau peristiwa luar biasa dan mengalami krisis solvabilitas yaitu krisis keuangan berkepanjang selama 2 tahun anggaran dan tidak bisa diatasi melalui APBD.

## 5) Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut terbebani kewajiban untuk membayar kembali

*commit to user*

(Ketentuan Umum UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah). Pinjaman daerah merupakan salah satu sumber dari pendapatan daerah, pinjaman daerah digolongkan sebagai kelompok pembiayaan daerah (sumber penerimaan pembiayaan daerah) (UU No. 33 Th. 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 5 tentang Sumber Penerimaan Daerah: 271). Hal ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan pengadaan prasarana daerah serta peningkatan pelayanan masyarakat. Pembiayaan yang bersumber dari pinjaman harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan efek yang negatif khususnya bagi keuangan daerah dan stabilisasi ekonomi nasional.

a. Prinsip Dasar Pinjaman Daerah

- 1) Pinjaman Daerah digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pinjaman Daerah adalah suatu alternatif sumber pembiayaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, termasuk untuk menutup kekurangan arus kas.
- 3) Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah yang dananya berasal dari luar negeri (*On Lending*).
- 4) Daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.

- 5) Tidak melebihi batas defisit APBD dan batas kumulatif pinjaman daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sumber Pinjaman Daerah

Ada beberapa sumber darimana diperolehnya pinjaman daerah bagi pemerintah daerah, adapun sumber pinjaman daerah tersebut adalah (Bratakusumah dan Solihin, 2001: 191):

a. Dalam Negeri:

- Pemerintah Pusat.

Ketentuan-ketentuan mengenai pinjaman yang bersumber dari pemerintah pusat seperti jenis, jangka waktu pinjaman, masa tenggang, tingkat bunga, cara perhitungan dan cara pembayaran bunga, pengadministrasian dan penyaluran dana pinjaman ditetapkan oleh menteri keuangan.

- Lembaga Keuangan Bank.

Pelaksanaan pinjaman daerah yang bersumber dari lembaga keuangan bank mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Pelaksanaan pinjaman daerah yang bersumber dari lembaga keuangan bukan bank mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Masyarakat.

Pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat antara lain melalui penerbitan obligasi daerah. Pelaksanaan penerbitan dan pembayaran obligasi daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Sumber Lainnya.

Pinjaman daerah selain sumber tersebut diatas, misalnya pinjaman daerah dari pemerintah daerah lain.

b. Luar Negeri:

- Pinjaman Bilateral.
- Pinjaman Multilateral.

c. Jenis dan Jangka Waktu Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah dibagi menjadi 3 yaitu:

- 1) Pinjaman Jangka Panjang adalah pinjaman daerah dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga dan biaya lain sebagian atau keseluruhan harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 2) Pinjaman Jangka Menengah adalah pinjaman daerah dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan.



- 3) Pinjaman Jangka Pendek adalah pinjaman daerah dengan jangka waktu kurang/sama dengan 1 tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman, bunga dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran bersangkutan.

d. Persyaratan dan Prosedur Pinjaman Daerah

- Persyaratan Pinjaman Daerah

- 1) Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan APBD tahun sebelumnya.
- 2) Rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (DSCR) paling sedikit 2,5.
- 3) Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari pemerintah.
- 4) Pinjaman jangka menengah dan jangka panjang dilakukan dengan persetujuan DPRD.

- Prosedur Pinjaman Daerah

- 1) Pinjaman daerah dari pemerintah yang dananya bersumber dari pinjaman luar negeri.
- 2) Pinjaman daerah dari pemerintah yang dananya bersumber selain dari pinjaman luar negeri.
- 3) Pinjaman daerah dari sumber selain pemerintah baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang. Pinjaman ini dapat

dilakukan sepanjang tidak melampaui batas kumulatif pinjaman pemerintah dan pemerintah daerah.

e. Larangan Penjaminan

- 1) Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman haklain.
- 2) Pendapatan daerah dan barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan.
- 3) Proyek yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan.

f. Pembayaran Kembali Pinjaman

- 1) Seluruh kewajiban pinjaman daerah yang jatuh tempo wajib dianggarkan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan.
- 2) Dalam hal daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjamannya kepada pemerintah, kewajiban membayar pinjaman tersebut diperhitungkan dengan DAU dan DBH dari penerimaan negara yang menjadi hak daerah tersebut.

## 6) Indikator Kinerja Keuangan Daerah

Pada dasarnya terdapat 2 hal yang dapat dijadikan sebagai indikator kinerja, yaitu Kinerja Anggaran dan Anggaran Kinerja. Kinerja Anggaran merupakan instrumen yang dipakai oleh DPRD untuk mengevaluasi kinerja kepala daerah, sedangkan Anggaran Kinerja merupakan instrumen yang dipakai oleh kepala daerah untuk mengevaluasi unit-unit kerja yang ada di bawah kendali daerah selaku

*commit to user*

manager eksekutif. Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu program kerja telah dilaksanakan secara efisien dan efektif (Mardiasmo, 2002:19).

Indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan daerah adalah sebagai berikut:

a. Analisis Surplus/Defisit APBD

Analisis ini digunakan untuk memantau kebijaksanaan fiskal di pemerintahan daerah. Analisis ini disajikan dengan 2 pendekatan menurut (PP 58 Tahun 2005) yaitu:

*surplus/defisit = pendapatan daerah – belanja daerah*, sedangkan

menurut PMK (Peraturan Menteri Keuangan) 72 Tahun 2006 yaitu:

*surplus/defisit = (pendapatan – belanja) + silpa + pencairan dana cadangan.*

b. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

DDF antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada umumnya ditunjukkan oleh variabel-variabel seperti (i) PAD terhadap total penerimaan daerah, (ii) Rasio Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak daerah (BHPBP) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD), (iii) Rasio Sumbangan Bantuan Daerah (SBD) terhadap TPD (Abdul Halim, 2004).

c. Derajat Otonomi Fiskal (DOF)

Kemandirian Keuangan Daerah adalah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar

*commit to user*

pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Abdul Halim, 2004).

d. Upaya Fiskal/Posisi Fiskal

Usaha pajak dapat diartikan sebagai rasio antar penerimaan pajak dengan kapasitas membayar disuatu daerah. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan membayar pajak masyarakat adalah PDRB. Jika PDRB meningkat, maka kemampuan daerah dalam membayar pajak juga meningkat. Hal berarti bahwa administrasi penerimaan daerah dapat meningkatkan daya pajak (Abdul Halim, 2004).

e. Analisis Efektivitas (CLR)

Analisis ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasi PAD yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Abdul Halim, 2004).

f. Indeks Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah

Indeks Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk mengetahui jenis pajak/retribusi daerah termasuk dalam kategori prima, potensial, berkembang dan terbelakang.

g. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio ini digunakan untuk mengukur pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah.

#### h. Kemampuan Pinjaman Daerah (DSCR)

Kemampuan suatu daerah dalam mendapatkan uang atau manfaat dari pihak lain yang digunakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan pelayanan publik dengan konsekuensi harus mengembalikannya dalam waktu tertentu.

### C. Penelitian Terdahulu

**Muhammad Ilham Ramadhani (2009)** yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Daerah dan Kapasitas Pinjaman Daerah Sebelum Otonomi Daerah dan Pada Masa Otonomi Daerah di Kota Depok 1997/1998 – 2008.” Hasilnya DDF Kota Depok dikategorikan cukup pada waktu sebelum otonomi daerah dan kurang pada masa otonomi daerah. Perhitungan efektivitasnya sebelum otonomi daerah memenuhi target dengan rasio di atas 100%, sedangkan tingkat kemandiriannya sebelum otonomi daerah lebih rendah jika dibandingkan pada masa otonomi daerah dan memiliki pola hubungan partisipatif. Kemampuan daerahnya dalam melakukan pinjaman daerah jangka panjang, menunjukkan bahwa Kota Depok masih mempunyai peluang untuk mengembangkan sumber pembiayaan daerah berdasarkan sisa pokok pinjaman daerah yang lebih kecil dari ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 yaitu sebesar 75% dan (DSCR) yang lebih besar dari UU No. 33 Tahun 2004 yaitu  $\geq 2,5$ .

**Fatima Zahra (2008)** yang berjudul “Analisis Keuangan Daerah di Kabupaten Karanganyar Perbandingan Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (1994/1995-2006).” Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui

kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar baik sebelum dan sesudah otonomi daerah. Data yang digunakan adalah data APBD 12 tahun anggaran. Hasil dari analisis deskriptif menunjukkan bahwa APBD Kabupaten Karanganyar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dilihat dari analisis kuantitatif tentang DDF, KF, Kebutuhan Fiskal bahwa kabupaten karanganyar cenderung mengalami penurunan pada era sebelum otonomi daerah dibandingkan selama otonomi daerah. Dilihat dari Upaya Fiskal yaitu rata-rata perubahan PAD dan PDRB menunjukkan hasil baik yaitu elastis baik harga barang/harga konsumen, sedangkan dilihat dari rasio aktivitas keserasian bahwa Kabupaten Karanganyar belanja rutin lebih besar daripada belanja pembangunan, sehingga manfaat yang diperoleh masyarakat sangat rendah. Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Karanganyar adalah rendah (konsultatif).

**Alfian Mujiwardhani (2008)** dengan judul “Analisis Kemandirian Daerah Kabupaten Cilacap Sebelum dan Selama Otonomi Daerah.” (Tinjauan Keuangan Daerah). Hasil yang diperoleh melalui penelitian menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Cilacap masih rendah. Besarnya hanya mencapai 12,91%, ini menunjukkan pola hubungan instruktif dimana pemerintah pusat peranannya lebih dominan dibanding kemandirian pemerintah daerah.

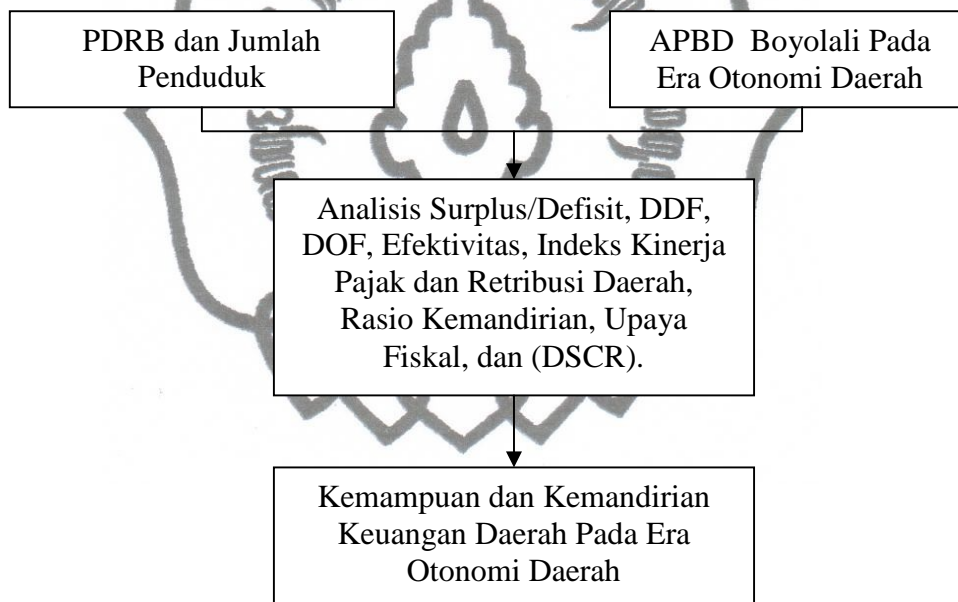
**Ana Prihatiningsih (2010)** dengan judul “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Surakarta.” Secara umum hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Surakarta dari segi



kinerja keuangannya belum mampu melaksanakan otonomi daerah atau kemampuan keuangannya masih rendah sekali dan mempunyai pola hubungan instruktif terhadap pemerintah pusat dilihat dari nilai rasio kemandirian kota yang bernilai 20,52% terletak antara 0%-25%.

#### D. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1



Dalam suatu penelitian diperlukan sebuah kerangka pemikiran untuk memecahkan masalah yang tersusun dan terarah.

Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk menganalisis kemampuan dan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Boyolali pada era otonomi daerah adalah derajat desentralisasi fiskal, derajat otonomi fiskal, upaya fiskal/posisi fiskal, rasio efektivitas PAD, analisis surplus/defisit APBD,

kinerja pajak dan retribusi daerah dan kemampuan pinjaman daerah. Untuk mengukurnya digunakan data pendapatan daerah (PAD, Sumbangan dan Bantuan serta Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak).

Dari pengukuran diatas dapat ditarik kesimpulan apakah pemerintah daerah Kabupaten Boyolali pada era otonomi daerah mampu mandiri dalam hal kinerja keuangan daerah.

#### **E. Hipotesis**

Hipotesis adalah suatu kesimpulan sementara tentang perilaku variabel-variabel dalam model yang digunakan, yang akan dibuktikan kebenarannya melalui syarat uji statistik.

1. Diduga Kabupaten Boyolali pada era otonomi daerah keuangan daerahnya masih rendah berdasarkan analisis surplus/defisit APBD, DDF, upaya fiskal, DOF, rasio efektivitas, serta kinerja pajak dan retribusi daerah.
2. Diduga Kabupaten Boyolali belum bisa mandiri dalam segi keuangan daerahnya yang diukur dengan menggunakan rasio kemandirian daerah dan pola hubungannya.
3. Diduga Kabupaten Boyolali pada era otonomi daerah kemampuan pinjaman daerahnya cukup baik dilihat dari jumlah kumulatif pokok pinjaman dan DSCR.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini berbentuk survey data sekunder dilokasi Kabupaten Boyolali yang berhubungan dengan kinerja keuangan daerah yang meliputi data perhitungan APBD Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2002-2008. Data didapat dari berbagai dokumen lingkungan pemerintahan Kabupaten Boyolali seperti, BPS Boyolali dan DPPKAD.

##### **B. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi seperti dibawah ini:

- 1) Data penjabaran target dan realisasi pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2002 - 2008 (DPPKAD).
- 2) Data gambaran umum Kabupaten Boyolali yang diperoleh dari Boyolali dalam angka (BPS).
- 3) Data jumlah penduduk Kabupaten Boyolali yang diperoleh dari Boyolali dalam angka tahun anggaran 2002 - 2008 (BPS).
- 4) Data PDRB Kabupaten Boyolali yang diperoleh dari boyolali dalam angka tahun anggaran 2002 - 2008 (BPS).
- 5) Data pinjaman daerah terhadap PDRB (DPPKAD).

### C. Definisi Operasional Variabel

- 1) APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.
- 2) Anggaran adalah daftar yang terperinci tentang penerimaan daerah dan peneluaran organisasi yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu.
- 3) Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan.
- 4) Belanja Wajib adalah belanja yang harus dipenuhi atau tidak bisa dihindarkan dalam tahun anggaran yang bersangkutan oleh pemerintah daerah.
- 5) Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka prosentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 6) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 7) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

- 8) Derajat Desentralisasi Fiskal merupakan perhitungan kontribusi PAD terhadap total APBD serta kontribusi sumbangan dan bantuan terhadap APBD.
- 9) Kemandirian Keuangan Daerah (derajat otonomi fiskal) adalah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.
- 10) PAD adalah penerimaan yang didapat dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.
- 11) Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembiayaan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah.
- 12) Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau lembaga yang dapat dipaksakan berdasarkan UU yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
- 13) Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menambah kekayaan pemerintah daerah.
- 14) Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah.

- 15) Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau manfaat bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
- 16) PDRB adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di suatu daerah dalam satu tahun tertentu. Dalam hal ini digunakan PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga konstan adalah nilai produk domestik regional bruto yang dihitung menurut harga yang tidak berubah dari tahun ke tahun. PDRB atas dasar harga berlaku adalah nilai produk domestik regional bruto yang dihitung menurut harga yang berlaku pada tahun tersebut yang digunakan untuk menilai barang dan jasa pada tahun tersebut.
- 17) Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasi PAD yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Abdul Halim, 2004:150).

#### **D. Teknik Analisis Data .**

Data yang telah terkumpul akan dihitung menggunakan dua cara analisis yaitu:

##### **1. Analisis Deskriptif**

Yaitu teknik analisis yang tidak berwujud angka, tapi berdasarkan pendapat, penjelasan dan pembahasan tertulis. Analisis digunakan untuk memberi gambaran tentang perkembangan APBD Kabupaten Boyolali



apakah surplus atau defisit dari tahun ke tahun dan kontribusi PAD terhadap APBD.

Untuk menghitung APBD apakah surplus/defisit digunakan analisis surplus/defisit dengan menggunakan 2 pendekatan dan untuk mengetahui apakah sudah memenuhi kriteria APBD apa belum, jika dilihat dari batas defisit APBD apakah melebihi dari 5% atau tidak menurut PMK No. 72 Tahun 2006. Analisis ini merupakan salah satu tugas Menteri Keuangan dalam rangka memantau kebijakan fiskal di pemerintahan daerah.

#### ❖ **Hipotesis 1**

##### Analisis Surplus/Defisit APBD

- Pendekatan Dasar (PP No. 58 Tahun 2005)

$$\text{Surplus/Defisit} = \text{Pendapatan Daerah} - \text{Belanja Daerah}$$

- Pendekatan Lanjutan sesuai dengan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) No. 72 Tahun 2006.

$$\text{Surplus/Defisit} = (\text{Pendapatan} - \text{Belanja}) + \text{Silpa} + \text{Pencairan Dana Cadangan}$$

## 2. Analisis Kuantitatif

Yaitu analisis berdasarkan perhitungan yang menjadi objek secara ilmiah yang berwujud angka

#### ❖ **Hipotesis 1**

Untuk menghitungnya digunakan rumus sebagai berikut:

### 1) Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Abdul Halim; 329-337, 2004).

$$\frac{PAD}{TPD} \times 100\% \dots\dots\dots(3.1)$$

$$\frac{BHPBP}{TPD} \times 100\% \dots\dots\dots(3.2)$$

$$\frac{SumbanganDaerah}{TPD} \times 100\% \dots\dots\dots(3.3)$$

$$TPD = PAD + BHPBP + SD$$

Ket : TPD = Total Penerimaan Daerah

PAD = Pendapatan Asli Daerah

SD = Sumbangan Daerah

BHPBP = Bagi Hasil Pajak dan Beban Pajak

Belum Mandiri	DDF < 50%	Perbandingan PAD dan
Sudah Mandiri	DDF > 50%	BHPBP terhadap TPD
Sudah Mandiri	DDF < 50%	Perbandingan, SBD
Belum Mandiri	DDF > 50%	terhadap TPD

### 2) Dearajat Otonomi Fiskal (DOF)

Derajat otonomi fiskal menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat (Mulyanto, 2004:7). Pengukuran DOF menggunakan rumus (Adrianus Dwi. S, 2008 dalam Ana Prihatiningsih 2010).

$$DOF = \frac{pajak \div retribusidaerah}{TBD} \times 100\% \dots\dots\dots(3.5)$$

Ket: TBD = Total Belanja Daerah

### 3) Upaya/Posisi Fiskal

Upaya/Posisi Fiskal dihitung dengan mencari koefisien elastisitas PAD terhadap PDRB. PAD elastis maka struktur PAD makin baik (Abdul Halim; 21-32, 2004).

$$E. PAD = \frac{pertumbuhanPAD\%}{pertumbuhanPDRB\%} \times 100\% \dots\dots\dots(3.4)$$

### 4) Analisis Efektivitas

Perhitungan Efektivitas PAD menggunakan rumus sebagai berikut (Abdul Halim, 2004):

$$\text{Efektivitas PAD} : \frac{realisasiPAD}{targetPAD} \times 100\% \dots\dots\dots(3.6)$$

Dikatakan efektif bila rasio yang dicapai minimal 1 atau 100%.

Semakin tinggi rasio efektivitas semakin baik kemampuan keuangan daerahnya.

### 5) Indeks Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah

Alat pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut

(Mulyanto, 2004:8-14):

$$\bullet \quad RPXi = \frac{realisasiXi}{targetXi} \times 100\% \dots\dots\dots(3.7)$$

Dimana RPXi adalah Rasio Pengumpulan Pajak/Retribusi Daerah

$$\bullet \quad RTXi_t = \frac{Xi_t - Xi_{t-1}}{Xi_{t-1}} \times 100\% \dots\dots\dots(3.8)$$

Dimana  $RTXi_t$  adalah Pertumbuhan Pajak/Retribusi Daerah

$$\bullet \quad KSXi = \frac{Xi}{X_{total}} \times 100\% \dots\dots\dots(3.9)$$

Dimana KSXi adalah Kontribusi Pajak/Retribusi Daerah.

#### 6) Matrik Potensi PAD

Untuk menilai pajak atau dapat digunakan matrik klasifikasi apakah termasuk prima, potensial, berkembang atau terbelakang.

( Mulyanto,2001;24-25 ).

#### Matrik Potensi Jenis Pajak dan Retribusi Daerah

PROPORSI PERTUMBUHAN	$\frac{Xi}{rata - rata} \geq 1$	$\frac{Xi}{rata - rata} < 1$
$\frac{\Delta x_i}{\Delta X_{total}} \geq 1$	PRIMA	BERKEMBANG
$\frac{\Delta x_i}{\Delta X_{total}} < 1$	POTENSIAL	TERBELAKANG

Ket:  $x_i$  = jenis pajak atau retribusi daerah

Sumber: Mulyanto (2001). Identifikasi dan Analisis Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Eks Karisidenan Surakarta, hal 24-25.

#### ❖ Hipotesis 2

Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Daerah

*commit to user*

Secara konsepsional, pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, walaupun pengukuran kemampuan keuangan daerah ini akan menimbulkan perbedaan. Ada empat macam pola hubungan (Paul Hersey dan Kenneth Blanchard) yang memperkenalkan hubungan situasioanal yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, anatara lain:

1. Pola hubungan instruktif, peranan pemerintah lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. (Daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
2. Pola hubungan konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
3. Pola hubungan partrisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
4. Pola hubungan delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Sebagai acuannya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

### Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	<b>Instruktif</b>
Rendah	25% - 50%	<b>Konsultatif</b>
Sedang	50% - 75%	<b>Partisipatif</b>
Tinggi	75% - 100%	<b>Delegatif</b>

Sumber: Nataluddin dalam Abdul Halim, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, 2004.

Untuk mengujinya digunakan rumus :

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{PAD}{Bant + Sumb + Pinj} \times 100\% \dots\dots\dots(3.10)$$

### ❖ Hipotesis 3

Untuk menguji hipotesis 3 digunakan rumus dengan model Debt Service Coverage Ratio (DSCR).

DSCR adalah perbandingan antara penjumlahan PAD, Bagian Daerah dari PBB, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta Penerimaan SDA dan Bagian Daerah Lainnya seperti PPH perorangan, DAU setelah dikurangi Belanja Wajib dengan penjumlahan Angsuran Pokok, Bunga dan Biaya Pinjaman Lainnya yang jatuh tempo.



Bila dirumuskan sebagai berikut (Bratakusumah dan Solihin; 193-195):

$$DSCR = \frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{P + B + BL} \geq 2,5 \dots\dots\dots(3.11)$$

DSCR = Debt Service Coverage Ratio

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BD = Bagian Daerah dari PBB, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta Penerimaan SDA dan Bagian Daerah Lainnya seperti PPH perorangan.

DAU = Dana Alokasi Umum

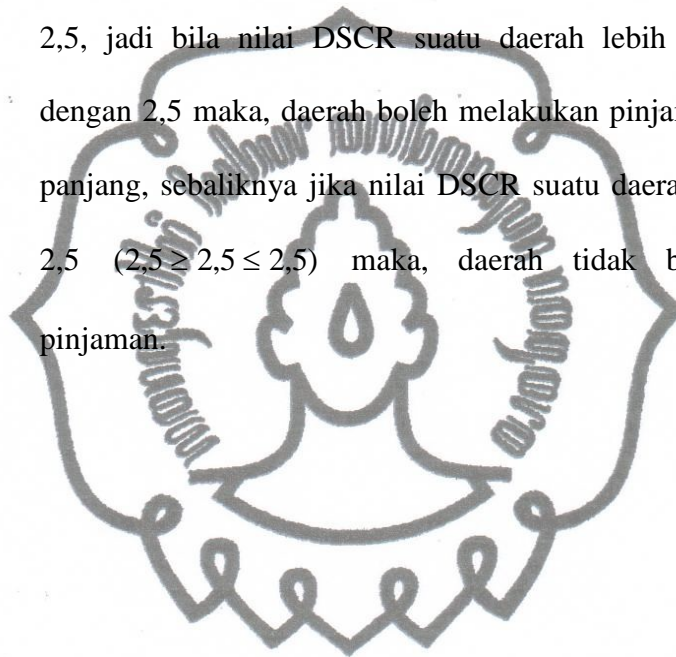
BW = Belanja Wajib, yaitu belanja yang harus dipenuhi atau tidak bisa dihindarkan dalam tahun anggaran yang bersangkutan oleh pemerintah daerah seperti belanja pegawai.

P = Angsuran Pokok Pinjaman yang jatuh tempo pada tahun anggaran yang bersangkutan.

B = Bunga Pinjaman yang jatuh tempo pada tahun anggaran yang bersangkutan.

BL = Biaya Lainnya (biaya komitmen, biaya bank, dll) yang telah jatuh tempo.

Secara umum DSCR merupakan jumlah penerimaan yang tersedia untuk membayar pinjaman dibandingkan dengan jumlah pemayaran pinjaman yang diwajibkan untuk suatu pinjaman sesuai dengan PP RI No. 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah. Mengenai persyaratan pinjaman daerah, nilai DSCR paling sedikit 2,5, jadi bila nilai DSCR suatu daerah lebih besar atau sama dengan 2,5 maka, daerah boleh melakukan pinjaman daerah jangka panjang, sebaliknya jika nilai DSCR suatu daerah lebih kecil dari 2,5 ( $2,5 \geq 2,5 \leq 2,5$ ) maka, daerah tidak boleh melakukan pinjaman.



## BAB IV

### ANALISA DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

##### 1. Kondisi Geografis

Kabupaten Boyolali adalah salah satu dari 15 daerah kabupaten kota di wilayah Propinsi Jawa Tengah bagian selatan, terletak antara  $110^{\circ} 22' - 110^{\circ} 50'$  Bujur Timur dan  $7^{\circ} 36' - 7^{\circ} 71'$  Lintang Selatan. Kabupaten Boyolali memiliki jarak bentang dari barat ke timur sekitar 48 Km dan dari utara ke selatan sekitar 54 Km, adapun batas-batas daerah administratif Kabupaten Boyolali sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang
- Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Sukoharjo
- Sebelah Selatan : Kabupaten Klaten dan Daerah Jogjakarta
- Sebelah Barat : Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang

Secara administratif Kabupaten Boyolali terdiri dari 19 Kecamatan. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah:

Kecamatan Selo, Ampel, Cepogo, Musuk, Boyolali, Ngemplak, Nogosari, Simo, Klego, Karang Gede, Mojosongo, Teras, Sawit, Banyudono, Sambu, Andong, Kemusu, Wonosegoro dan Juwangi.

Kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Boyolali tersebut terbagi atas beberapa desa dan kelurahan. Jadi jika dijumlahkan, Kabupaten Boyolali mempunyai 262 desa dan lima kelurahan. Dari seluruh desa dan kelurahan yang ada, 224 desa/kelurahan merupakan desa yang berada di dataran rendah atau sekitar 83% dari seluruh desa atau kelurahan dan selebihnya merupakan desa di dataran tinggi.

## 2. Kondisi Topografi

Kabupaten Boyolali mempunyai ketinggian wilayah yang bervariasi yaitu antara 75 - 1.500 meter dari permukaan laut, dengan perincian sebagai berikut:

- a. 75 – 400 meter di atas permukaan laut meliputi wilayah Kecamatan Teras, Banyudono, Sawit, Mojosongo, Ngemplak, Simo, Kemusu, Karanggede, dan Boyolali.
- b. 400 – 700 meter di atas permukaan laut meliputi wilayah Kecamatan Boyolali, Musuk, Mojosongo, Cepogo, dan Ampel.
- c. 700 – 1000 meter di atas permukaan laut meliputi wilayah Kecamatan Musuk, Ampel, dan Cepogo.
- d. 1000 – 1300 meter di atas permukaan laut meliputi sebagian wilayah Kecamatan Cepogo, Ampel, dan Selo.
- e. 1300 – 1500 meter di atas permukaan laut meliputi wilayah Kecamatan Selo.

Secara umum wilayah Kabupaten Boyolali terbagi menjadi empat relief daerah yaitu :

*commit to user*

a. Lereng Gunung Merbabu

Membentang ke arah Timur, meliputi sebagian besar kecamatan Ampel.

b. Lereng Gunung Merapi (dari puncak ke kaki gunung)

Membentang ke arah Timur, meliputi kecamatan selo, Cepogo, dan Musuk.

c. Daerah Rendah

Merupakan daerah terendah di Kabupaten Boyolali, meliputi kecamatan Boyolali, Mojosongo, Teras, Banyudono, Sawit, Sambi, Nogosari, dan Ngemplak.

d. Daerah Berbukit

Meliputi daerah sekitar pegunungan kendeng, meliputi kecamatan Simo, Wonosegoro, Klego, Andong, Kemusu, Karanggede, dan Juwangi.

Kabupaten Boyolali memiliki iklim tropis, seperti kota-kota lainnya yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan karena letak Negara Indonesia yang berada di sekitar garis khatulistiwa sehingga akan mengalami iklim tropis yang bersifat panas (mempunyai temperatur tinggi).

Wilayah yang beriklim tropis hanya memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Untuk rata-rata curah hujan yang ada di Kabupaten Boyolali tergolong tinggi, yaitu sekitar 2000 milimeter / tahun.

### 3. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk kabupaten Boyolali berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun 2008 tercatat sebesar 943.693 jiwa yang terdiri dari 461.452 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 482.241 jiwa berjenis kelamin perempuan. Dengan demikian nilai sex ratio (rasio penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan) sebesar 95.63 dan kepadatan penduduk sebesar 929 jiwa.

**Tabel 4.1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008**

Tahun	Jml Pnddk			Kpdtn Pnddk
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
2002	450.521	474.331	922.852	909
2003	452.847	474.655	927.502	914
2004	455.083	476.297	931.38	917
2005	457.389	478.379	935.768	922
2006	459.106	479.981	939.087	925
2007	460.072	481.075	941.147	927
2008	461.452	482.241	943.693	929

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali 2008

Menurut komposisi penduduk berdasarkan usia akhir tahun 2008, maka penduduk yang termasuk dalam kelompok umur 0-14 tahun berjumlah 259.008 jiwa, kelompok umur 15-64 tahun berjumlah 614.101 jiwa dan kelompok umur 65 tahun ke atas berjumlah 73.611 jiwa. Dengan demikian, dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kabupaten Boyolali termasuk dalam kelompok produktif yang dalam hal ini merupakan asset bagi pembangunan daerah. Berikut data komposisi penduduk menurut kelompok umur di kabupaten Boyolali.



**Tabel 4.2. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008**

Tahun	0 - 14 Tahun		15 - 64 Tahun		> 65 Tahun		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
2002	120.761	123.037	304.326	319.519	25.434	30.135	923.212
2003	129.010	124.735	291.087	310.848	32.692	39.072	927.444
2004	129.659	125.170	292.576	321.915	32.855	39.212	941.380
2005	130.095	125.563	294.404	313.595	32.890	39.221	935.768
2006	130.581	125.985	295.509	315.643	33.016	39.353	939.087
2007	130.858	126.275	296.126	315.359	33.088	39.441	941.147
2008	131.252	127.756	297.123	316.978	34.088	39.531	946.728

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali 2008

Dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Boyolali yang paling banyak adalah pada tahun 2008, dengan penduduk yang berusia 15-64 tahun dengan jumlah 614.101 jiwa dan pada usia produktif. Hal itu sangat menguntungkan bagi Kabupaten Boyolali karena usia produktif mempunyai kemampuan untuk melakukan kegiatan ekonomi dan mempunyai peranan besar bagi kinerja keuangan daerah.

**Tabel 4.3. Penduduk Kabupaten Boyolali Usia Sepuluh Tahun Keatas Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2008**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pertanian tanaman Pangan	233.585
2	Perkebunan	15.565
3	Perikanan	1.049
4	Peternakan	45.672
5	Pertanian Lainnya	25.285
6	Industri Pengolahan	40.942
7	Perdagangan	54.314
8	Jaza	60.043
9	Angkutan	6.976
10	Lainnya	294.323
<b>Jumlah</b>		<b>777.752</b>

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali 2008

Dilihat berdasarkan mata pencaharian penduduk Boyolali tahun 2008, penduduk yang bermata pencaharian sebagai angkutan merupakan jumlah yang paling sedikit dengan total 6.976 orang. Hal ini disebabkan karena letak Boyolali yang berada di lereng gunung merapi dan merbabu yang membuat tanah di daerah tersebut menjadi subur serta keadaan iklim yang baik, sumber air yang bagus dan masih banyak lahan kosong untuk bercocok tanam, maka penduduk setempat lebih memilih bermata pencaharian sebagai petani dibandingkan sebagai angkutan. Jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani khususnya tanaman pangan merupakan yang paling banyak dengan total 233.585 orang.

#### **4. Keadaan Perekonomian**

Pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan suatu usaha masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan ekonomi bisa dikatakan baik apabila dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang baik dan tergantung dari potensi daerah, peran pemerintah, dan juga pelaku dari pembangunan itu sendiri (masyarakat). Pertumbuhan ekonomi dapat ditunjukkan dengan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali dari tahun 2001-2008 mengalami fluktuasi naik turun, dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2002 sebesar 227,35%, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2008 sebesar 4,05%.

**Tabel 4.4. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Boyolali Tahun 2001-2008**

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2001	3,63
2002	227,35
2003	4,86
2004	3,41
2005	4,07
2006	4,19
2007	4,07
2008	4,05

Sumber: *BPS Kabupaten Boyolali*, data diolah

PDRB adalah nilai barang-barang dan jasa yang diproduksi di suatu daerah dalam satu periode atau tahun tertentu. Dengan melihat PDRB Kabupaten Boyolali dapat memberikan gambaran keadaan serta kinerja perekonomian makro secara regional lebih jelas dari periode sekarang ke periode yang akan datang. Hal ini dapat membantu pemerintah dalam menentukan arah kebijakan yang akan dikeluarkan.

PDRB atas dasar harga konstan adalah nilai produk domestik regional bruto yang dihitung menurut harga yang tidak berubah dari tahun ke tahun, sebagai tahun dasar digunakan tahun 2000. PDRB atas dasar harga berlaku adalah nilai produk domestik regional bruto yang dihitung menurut harga yang berlaku pada tahun tersebut yang digunakan untuk menilai barang dan jasa pada tahun tersebut serta pergeseran dan struktur ekonomi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.5. PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008 Dalam Rp (000).**

Lap Usaha	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Pertanian	1.367.464.244 <b>40,84</b>	1.427.826.591 <b>39,74</b>	1.496.595.886 <b>37,05</b>	1.616.461.947 <b>34,85</b>	1.759.000.062 <b>34,21</b>	1.955.252.775 <b>34,25</b>	2.280.068.503 <b>35,36</b>
Pertambangan	24.550.451 <b>0,73</b>	27.947.077 <b>0,78</b>	31.684.973 <b>0,75</b>	35.061.093 <b>0,76</b>	43.423.360 <b>0,84</b>	50.497.013 <b>0,88</b>	54.538.168 <b>0,85</b>
Ind peng	697.022.870 <b>12,25</b>	729.848.622 <b>12,00</b>	751.045.945 <b>17,68</b>	805.496.777 <b>17,35</b>	876.702.691 <b>17,05</b>	944.647.149 <b>16,55</b>	1.018.707.487 <b>15,80</b>
Listrik, Gas, Air Bersih	24.124.264 <b>0,72</b>	32.969.251 <b>0,91</b>	39.847.009 <b>0,84</b>	45.813.432 <b>0,99</b>	61.311.661 <b>1,19</b>	69.129.432 <b>1,21</b>	75.256.962 <b>1,17</b>
Bangunan	88.987.804 <b>1,76</b>	94.587.362 <b>1,75</b>	103.315.149 <b>2,37</b>	116.828.771 <b>2,52</b>	132.756.255 <b>2,58</b>	154.535.799 <b>2,71</b>	165.662.376 <b>2,57</b>
Perdagangan	1.035.639.424 <b>25,33</b>	1.086.908.738 <b>24,82</b>	1.128.221.977 <b>26,56</b>	1.218.703.883 <b>26,27</b>	1.328.865.739 <b>25,84</b>	1.458.395.936 <b>25,55</b>	1.622.836.139 <b>25,17</b>
Angkutan dan Komunikasi	103.853.261 <b>3,09</b>	109.772.484 <b>3,04</b>	117.691.328 <b>2,77</b>	142.042.874 <b>3,06</b>	169.198.008 <b>3,29</b>	177.712.938 <b>3,11</b>	193.084.376 <b>2,99</b>
Kuangan, Persewaan dan Jasa Perush	219.498.761 <b>8,03</b>	245.781.540 <b>9,08</b>	268.073.057 <b>6,31</b>	286.449.048 <b>6,17</b>	309.414.235 <b>6,02</b>	339.181.574 <b>5,94</b>	393.297.896 <b>6,10</b>
Jasa-jasa	244.110.253 <b>7,26</b>	284.025.775 <b>7,88</b>	313.623.410 <b>7,38</b>	372.648.426 <b>8,03</b>	461.761.023 <b>8,98</b>	558.711.355 <b>9,79</b>	642.294.461 <b>9,96</b>
<b>Jumlah</b>	3.805.251.332 <b>100</b>	4.039.667.440 <b>100</b>	4.250.098.734 <b>100</b>	4.639.506.251 <b>100</b>	5.142.433.034 <b>100</b>	5.708.063.971 <b>100</b>	6.446.546.368 <b>100</b>

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, data diolah

Dilihat dari tabel di atas dari tahun 2002 sampai tahun 2008, sektor pertanian menjadi sektor unggulan atau andalan di Kabupaten Boyolali dalam memberikan sumbangan terhadap PDRB Kabupaten Boyolali sebesar 40,84 (2002), 39,74 (2003), 37,05 (2004), 34,85 (2005), 34,21 (2006), 34,25 (2007), 35,36 (2008). Hal ini dikarenakan dipengaruhi oleh keadaan topografis dan keadaan demografis yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.

**Tabel 4.6. PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008 Dalam Rp (000).**

Lap Usaha	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Pertanian	1.067.934.242 <b>31,50</b>	1.141.635.618 <b>30,90</b>	1.214.789.225 <b>35,79</b>	1.270.600.780 <b>36,76</b>	1.290.672.178 <b>35,84</b>	1.305.830.800 <b>34,48</b>	1.328.683.026 <b>34,07</b>
Pertambangan	21.396.593 <b>0,52</b>	22.760.060 <b>0,51</b>	24.579.143 <b>0,75</b>	25.863.893 <b>0,75</b>	30.698.735 <b>0,85</b>	34.309.698 <b>0,92</b>	35.458.142 <b>0,90</b>
Ind peng	567.377.182 <b>17,29</b>	570.773.928 <b>17,33</b>	561.277.889 <b>17,13</b>	563.954.895 <b>16,31</b>	582.759.034 <b>16,18</b>	609.253.241 <b>16,26</b>	638.447.911 <b>16,37</b>
Listrik, Gas, Air Bersih	21.025.155 <b>1,22</b>	26.850.111 <b>1,46</b>	30.910.720 <b>0,94</b>	33.795.686 <b>0,98</b>	42.784.225 <b>1,19</b>	46.644.081 <b>1,24</b>	50.808.090 <b>1,30</b>
Bangunan	77.554.463 <b>2,98</b>	76.346.303 <b>2,88</b>	80.143.545 <b>2,38</b>	84.927.588 <b>2,46</b>	92.569.242 <b>2,57</b>	104.995.685 <b>2,80</b>	107.703.660 <b>2,77</b>
Perdagangan	822.401.470 <b>25,91</b>	854.338.509 <b>25,61</b>	863.855.668 <b>26,36</b>	897.510.193 <b>25,97</b>	917.695.400 <b>25,49</b>	940.415.435 <b>25,09</b>	971.814.681 <b>24,92</b>
Angkutan dan Komunikasi	85.276.458 <b>5,00</b>	84.273.029 <b>4,73</b>	87.272.635 <b>2,67</b>	91.433.794 <b>2,64</b>	99.299.886 <b>2,76</b>	101.148.510 <b>2,69</b>	105.867.359 <b>2,71</b>
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perush	195.975.066 <b>5,75</b>	208.318.299 <b>6,07</b>	220.071.179 <b>6,72</b>	222.845.571 <b>6,45</b>	230.414.003 <b>6,40</b>	238.020.006 <b>6,35</b>	250.737.193 <b>6,43</b>
Jasa-jasa	203.363.517 <b>9,84</b>	225.770.642 <b>10,51</b>	237.836.806 <b>7,26</b>	265.456.399 <b>7,68</b>	314.005.265 <b>8,72</b>	367.484.657 <b>9,81</b>	409.852.796 <b>10,51</b>
<b>Jumlah</b>	<b>3.062.304.146</b> <b>100</b>	<b>3.211.066.499</b> <b>100</b>	<b>3.320.736.810</b> <b>100</b>	<b>3.456.062.124</b> <b>100</b>	<b>3.600.897.968</b> <b>100</b>	<b>3.747.733.278</b> <b>100</b>	<b>3.899.372.858</b> <b>100</b>

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, data diolah

Jika dilihat dari perkembangan tahun 2007 ke tahun 2008, maka pertumbuhan riil yang paling tinggi adalah dari sektor jasa-jasa yaitu sebesar 11,53%. Berikutnya sektor listrik, gas, air bersih dan keuangan, persewaan, jasa perusahaan dengan masing-masing sebesar 8,93% dan 5,34%. Sedangkan pertumbuhan riil yang paling rendah terjadi pada sektor pertanian sebesar 1,75%.

## 5. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Pendapatan perkapita yang ada di Kabupaten Boyolali pada tahun 2001 hingga 2008 dapat dilihat pada Tabel 4.7.

**Tabel 4.7. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Boyolali Tahun 2001–2008 (Tahun Dasar 2000 = 100)**

Tahun	Harga Perkapita (Rp)	Berlaku Perubahan (%)	Harga Perkapita (Rp)	Konstan Perubahan(%)
2001	3.667.412,64	20,23	3.226.125,18	5,77
2002	4.094.565,11	11,65	3.295.131,55	2,14
2003	4.328.536,66	5,71	3.440.683,99	4,42
2004	4.534.314,07	4,75	3.542.803,26	2,97
2005	4.394.668,51	8,83	3.675.934,47	3,76
2006	5.458.438,41	10,61	3.822.175,15	3,98
2007	6.036.746,72	10,59	3.963.578,22	3,70
2008	6.800.003,76	12,64	4.113.171,39	3,77

Sumber: *BPS Kabupaten Boyolali*, data diolah

Berdasarkan Tabel 4.7. dapat diketahui bahwa pertumbuhan PDRB perkapita dari tahun 2001 hingga tahun 2008 berfluktuatif. Pertumbuhan yang paling besar terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 12,64% ADHB (harga berlaku). Pertumbuhan kapita yang tinngi tersebut sebagian besar didukung oleh sektor pertanian dan perdagangan, sehingga pendapatan penduduk pada tahun 2007 mencapai Rp. 6.800.003,76 per tahun per orang, berarti ada kenaikan sebesar Rp. 763.257,04 per tahun per orang atau ada kenaikan Rp. 2.091,12 dalam satu hari per orang.



Dari tabel 4.7. kolom (2) di atas pada tahun 2008 dengan pendapatan per kapita ADHB sebesar Rp. 6.800.003,76 setahun, berarti per kapita per bulan sebesar Rp. 566,67 dan kapita per hari / orang sebesar Rp. 18.630,15.

Dari perhitungan tersebut di atas, maka secara rata-rata penduduk kabupaten Boyolali berpendapatan di atas garis minimal kemiskinan. Hanya masalahnya pendapatan yang dihitung dalam PDRB adalah termasuk pendapatan yang dimiliki oleh orang luar kabupaten Boyolali tetapi memiliki usaha di wilayah Regional Kabupaten Boyolali.

#### **6. Aspek Keuangan Daerah**

Untuk melihat aspek keuangan daerah dapat dilihat melalui target dan realisasi APBD. Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan harus bisa memanfaatkan potensi daerahnya untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri. Berlakunya otonomi daerah pemerintah diharapkan untuk lebih mandiri dan tidak tergantung dari Pemerintah Pusat.

Realisasi APBD Kabupaten Boyolali tahun 2008 yang merupakan pendapatan yang terbagi menjadi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain PAD sah adalah sebesar 782.528.354.413. Belanja Daerah terbagi menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dengan jumlah realisasi sebesar 793.262.107.869. dari realisasi APBD tahun 2008 di Kabupaten Boyolali terjadi defisit sebesar 1.073.375.340.

## B. Hasil Analisis dan Pembahasan

### 1. Analisis Deskriptif

#### a. Analisis Surplus/Defisit APBD (Pertumbuhan APBD)

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. APBD dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dari segi pendapatan daerah atau dari segi belanja daerah. Hasil analisis tersebut akan digunakan untuk pengambilan kebijakan fiskal pada tahun yang akan datang. Untuk mengetahuinya dapat dilihat dari tabel pertumbuhan APBD Kabupaten Boyolali tahun 2002-2008 di bawah ini.

**Tabel 4.8. Analisis Surplus/Defisit APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008 Menurut Pendekatan Dasar (PP No. 5 Tahun 2005).**

Tahun	Total Pendapatan Daerah	Total Belanja Daerah	Surplus/Defisit
2002	325.257.089.102	287.269.875.585	37.987.213.517
2003	389.246.882.291	390.543.661.686	(-)1.296.779.400
2004	403.049.052.311	395.692.549.618	7.356.502.700
2005	439.245.327.765	427.428.312.570	1.181.701.520
2006	630.290.112.803	530.074.202.239	1.002.159.106
2007	707.982.616.528	738.497.675.773	(-)3.051.506.920
2008	782.528.354.413	793.262.107.869	(-)1.073.375.340

Sumber: *DPPKAD* Kabupaten Boyolali, data diolah

**Tabel 4.9. Analisis Surplus/Defisit APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008 Menurut (PMK No. 72 Tahun 2006).**

Tahun	Pendapatan Daerah	Belanja Daerah	Silpa	Pencairan Dana Cadangan	Surplus/Defisit
2002	325.257.089.102	287.269.875.585	14.747.069.678	0	52.734.283.180
2003	389.246.882.291	390.543.661.686	39.719.462.091	0	38.422.682.690
2004	403.049.052.311	395.692.549.618	30.615.051.022	0	37.971.553.720
2005	439.245.327.765	427.428.312.570	36.811.306.043	0	37.993.007.560
2006	630.290.112.803	530.074.202.239	44.028.253.565	0	45.030.412.670
2007	707.982.616.528	738.497.675.773	139.080.981.579	0	136.029.474.600
2008	782.528.354.413	793.262.107.869	94.362.883.685	0	93.289.508.340

Sumber: *DPPKAD* Kabupaten Boyolali, data diolah

Dilihat dari kedua tabel di atas jika dibandingkan, yang pertama menurut pendekatan dasar (PP No. 5 Tahun 2005), maka PEMDA Boyolali bisa dikatakan pada tahun 2002, 2004, 2005, 2006 sudah memenuhi kriteria APBD karena jumlah APBD mengalami surplus. Sedangkan pada tahun 2003, 2007, 2008 PEMDA Boyolali juga bisa dikatakan sudah memenuhi kriteria APBD karena jumlah APBD mengalami defisit dan jumlah defisit tersebut tidak melebihi 5% dari total pendapatan.

Kemudian pertumbuhan yang kedua menurut (PMK No. 72 Tahun 2006), maka PEMDA Boyolali bisa dikatakan sudah memenuhi kriteria APBD karena jumlah APBD pada tahun 2002-2008 mengalami surplus. Pada tahun 2007 terjadi fluktuasi silpa dari tahun sebelumnya sebesar 139.080.981.579, hal itu terjadi karena pada tahun tersebut pemasukan pendapatan daerah dari PAD, dana perimbangan dan lain PAD yang sah mengalami kenaikan yang tinggi dari pendapatan tahun-

tahun sebelumnya. Meningkatnya pendapatan juga akan meningkatkan belanja daerah.

#### b. Kontribusi PAD terhadap APBD

Besarnya kontribusi PAD terhadap APBD juga merupakan salah satu cara untuk mengetahui tingkat kemampuan suatu daerah. PAD merupakan penerimaan daerah dari usaha untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Tabel 4.10. Kontribusi PAD Terhadap APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008**

Tahun	PAD	APBD	Kontribusi
2002	24.460.325.825	612.526.964.687	3,99
2003	32.781.305.308	779.790.543.977	4,20
2004	36.970.682.463	798.741.601.929	4,63
2005	49.816.906.083	866.673.640.335	5,75
2006	59.307.283.906	1.160.364.315.042	5,11
2007	67.437.551.010	1.446.480.292.301	4,66
2008	63.733.408.461	1.575.790.462.282	4,04
<b>Rerata</b>			4,62

Sumber: *DPPKAD* Kabupaten Boyolali, data diolah

Hasil dari perhitungan tabel di atas memperlihatkan bahwa kontribusi PAD terhadap APBD dalam kurun waktu 2002-2005 terus mengalami peningkatan. Tapi sebaliknya dalam kurun waktu 2006-2008 mengalami penurunan dengan kontribusi PAD terhadap APBD yang terendah adalah pada tahun 2008 dengan nilai sebesar 4,04%. Nilai rata-rata dari kontribusi PAD terhadap APBD ini adalah 4,62%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Boyolali

masih perlu mengoptimalkan dan menggali potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah yang juga berpotensi bagi pemasukan PAD.

## 2. Analisis Kuantitatif

### a. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

DDF digunakan untuk mengukur kinerja Pemda Kabupaten Boyolali apakah sudah bisa dikatakan mandiri apa belum. Pengukuran DDF dapat menggunakan beberapa indikator rasio. Indikator/rasio yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP), Sumbangan dan Bantuan Daerah (SBD) dibagi satu-satu dengan Total Penerimaan Daerah (TPD).

Batas ukurannya yaitu bila hasil rasio antara PAD, BHPBP dengan TPD lebih dari 50%, maka kemampuan keuangan daerahnya dapat diartikan sudah baik atau mandiri. Sebaliknya bila nilainya kurang dari 50%, maka kemampuan keuangan daerah dikatakan belum mandiri. Sedangkan untuk rasio antara SBD dengan TPD, bila nilainya lebih dari 50%, maka dapat diartikan tingkat ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat sangat tinggi dan sebaliknya bila kurang dari 50%, maka dapat diartikan tingkat ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat rendah atau berkurang.

#### Kriteria batasan DDF:

Belum Mandiri	DDF < 50%	Perbandingan PAD dan BHPBP terhadap TPD
Sudah Mandiri	DDF > 50%	
Sudah Mandiri	DDF < 50%	Perbandingan, SBD terhadap TPD
Belum Mandiri	DDF > 50%	

**Tabel 4.11. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008**

Tahun	DDF (%)		
	PAD/TPD	BHPBP/TPD	SBD/TPD
2002	7,52	6,58	85,89
2003	8,42	4,21	87,37
2004	9,17	4,81	86,02
2005	11,34	5,27	83,39
2006	9,41	4,29	86,29
2007	9,52	4,58	85,90
2008	8,14	4,46	87,39
<b>Rerata</b>	<b>9,07</b>	<b>4,88</b>	<b>86,03</b>

Sumber: Hasil Ringkasan Pengolahan Data Sekunder

Dilihat dari tabel di atas bahwa rasio PAD terhadap TPD terus mengalami peningkatan dari tahun 2002 sampai tahun 2005, sedangkan pada tahun 2006 sampai tahun 2008 terus mengalami penurunan. Nilai rasio PAD terhadap TPD tertinggi pada tahun 2005 yaitu sebesar 11,34% dan yang terendah pada tahun 2002 yaitu sebesar 7,52%. Dilihat dari rata-ratanya, rasionya adalah 9,07%. Dengan melihat hasil rata-rata rasio PAD terhadap TPD pada tahun 2002-2008, maka dapat menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Boyolali dapat diartikan belum bisa mandiri.

Hasil rasio antara BHPBP terhadap TPD mengalami penurunan pada tahun 2002-2003, kemudian pada tahun 2004-2005 mengalami kenaikan, tetapi pada tahun selanjutnya sampai tahun 2008 mengalami penurunan lagi. Nilai maksimal rasionya terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar 6,58%, sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2003 sebesar 4,21%. Dengan nilai rerata BHPBP terhadap TPD tahun



2002-2008 yang sebesar 4,88% menunjukkan bahwa Kabupaten Boyolali dapat diartikan belum bisa mandiri.

Selanjutnya hasil rasio SBD terhadap TPD dari tahun ke tahun selalu mengalami naik turun. Nilai rasio tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 87,39% dan yang terendah terjadi pada tahun 2005 sebesar 83,39%. Sedangkan hasil rerata rasio SBD terhadap TPD dari tahun 2002-2008 sebesar 86,03%. Karena hasil rerata SBD terhadap TPD lebih dari 50%, maka hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Boyolali terhadap pemerintah pusat dalam hal keuangan masih sangat tinggi dan tingkat desentralisasi fiskalnya masih rendah sehingga bisa dikatakan belum bisa mandiri.

Dilihat dari beberapa perbandingan diatas, ada yang menunjukkan mengalami peningkatan dan penurunan pada tahun tertentu, hal tersebut disamping karena kemampuan pemerintah daerah Boyolali untuk meningkatkan PAD belum maksimal, juga karena pemungutan pajak dan bukan pajak yang diserahkan oleh pusat kepada daerah juga mengalami penurunan, walaupun nilai nominalnya bertambah tapi kontribusinya terhadap total penerimaan daerah menurun. Dari berbagai sumber penerimaan daerah, pinjaman daerah jangka panjang merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan derajat desentralisasi fiskal sehingga pemerintah daerah tidak terlalu tergantung terhadap pemerintah pusat.

### b. Derajat Otonomi Fiskal (DOF)

Derajat Otonomi Fiskal (DOF) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat (Mulyanto, 2004:7). DOF Kabupaten Boyolali dapat dihitung dengan menggunakan rasio antara pajak daerah, retribusi daerah dengan total belanja daerah.

**Tabel 4.12. Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008**

Tahun	DOF (%)
2002	6,82
2003	6,66
2004	8,19
2005	9,72
2006	8,12
2007	6,86
2008	6,32
<b>Rerata</b>	<b>7,53</b>

Sumber: Hasil Ringkasan Pengolahan Data Sekunder

Dilihat dari tabel di atas menunjukkan bahwa besarnya DOF Kabupaten Boyolali yang tertinggi terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 9,72% dan yang terendah terjadi pada tahun 2008 sebesar 6,32%. Bila dilihat dari rerata DOF Kabupaten Boyolali tahun 2002-2008 dengan nilai sebesar 7,53% maka kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat cenderung masih rendah karena nilai reratanya kurang dari 50%, yaitu syarat batasan nilai DOF.

### c. Upaya Fiskal

Upaya fiskal digunakan untuk mengukur kemampuan pendapatan suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal itu dapat dihitung dengan mencari koefisien elastisitas PAD terhadap PDRB dengan rata-rata pertumbuhan selama waktu tertentu. PAD bisa dikatakan semakin baik jika elastisitas PAD terhadap PDRB semakin tinggi.

**Tabel 4.13. Pertumbuhan PAD dan PDRB Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008**

Tahun	% Pert PAD	% Pert PDRB HB	% Pert PDRB HK
2002		-	-
2003	34,02	6,16	4,85
2004	12,77	5,20	3,41
2005	34,74	9,16	4,07
2006	19,05	10,84	4,19
2007	13,70	11,00	4,08
2008	(-) 5,49	12,93	4,04
<b>Rerata</b>	<b>18,13</b>	<b>9,21</b>	<b>4,11</b>

Sumber: Hasil Ringkasan Pengolahan Data Sekunder

Dilihat dari tabel 4.13 di atas dapat dihitung elastisitas PAD terhadap PDRB melalui perhitungan sebagai berikut :

Elastisitas PAD terhadap PDRB ADHB

$$\frac{18,13}{9,21} = 1,97$$

Elastisitas PAD terhadap PDRB ADHK

$$\frac{18,13}{4,11} = 4,41$$

Dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa menggunakan PDRB ADHK struktur PAD Kabupaten Boyolali lebih baik daripada menggunakan PDRB ADHB dikarenakan PDRB ADHK mempunyai elastisitas lebih tinggi. Dari perhitungan di atas pula bisa diketahui laju pertumbuhan PDRB ADHB berpengaruh sedikit terhadap peningkatan PAD, yaitu jika PDRB naik 1% maka PAD meningkat sebesar 1,97%. Sedangkan jika menggunakan PDRB ADHK laju pertumbuhan PDRB juga berpengaruh terhadap peningkatan PAD, yaitu jika PDRB naik 1% maka PAD juga akan naik sebesar 4,41%.

#### d. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintahan Daerah dalam merealisasikan PAD berdasarkan target yang ditetapkan dan disesuaikan dengan potensi riil daerah yang ada. Kemampuan daerah dikatakan efektif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya jika rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100%.

**Tabel 4.14. Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008**

Tahun	Bagian PAD			
	Pajak Daerah	Ret Daerah	Laba Ush Daerah	Lain" PAD Sah
2002	117,78	101,24	99,32	159,93
2003	102,36	110,82	100,00	111,84
2004	119,72	103,01	100,21	143,57
2005	104,59	93,71	110,30	130,64
2006	124,93	103,85	100,09	136,40
2007	110,13	108,85	103,32	113,06
2008	104,74	110,59	101,23	108,36
<b>Rerata</b>	<b>112,03</b>	<b>104,58</b>	<b>102,07</b>	<b>129,11</b>

Sumber: Hasil Ringkasan Pengolahan Data Sekunder

*commit to user*

Dilihat dari tabel di atas menunjukkan bahwa untuk pos pajak daerah rata-rata efektivitas PAD sebesar 112,03%, untuk retribusi daerah sebesar 104,58%, untuk laba usaha daerah sebesar 102,07% dan untuk lain-lain PAD yang sah sebesar 129,11%. Dari hasil rata-rata efektivitas PAD di atas dapat diketahui bahwa bagian PAD Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008 dikategorikan efektif. Dikategorikan efektif karena rasio efektivitasnya lebih besar dari 100%.

**e. Indeks Kinerja Pajak dan Retribusi**

Untuk mengetahui kemampuan pajak dan retribusi suatu daerah terhadap hasil PAD, dapat dilakukan dengan melihat nilai dari rasio pengumpulan, pertumbuhan maupun proporsi (kontribusi) pajak dan retribusi daerah. Semakin besar nilainya berarti semakin besar kemampuan pajak dan retribusi daerah terhadap hasil PAD. Oleh karena itu pos pajak dan retribusi daerah merupakan pos yang memberikan sumbangan relatif banyak terhadap PAD.

- 1) Rasio Pengumpulan Pajak dan Retribusi Daerah dapat dihitung dari perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan target pajak dan retribusi. Rasio tersebut digunakan untuk mengukur efektivitas realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Boyolali.

**Tabel 4.15. Rasio Pengumpulan Pajak Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008**

Tahun	Maksimal		Minimal	
	Jenis Pajak	Nilai (%)	Jenis Pajak	Nilai (%)
2002	PPJ	119,72	ABT dan APT	100,22
2003	P. Gal Gol C	123,88	P. Reklame	100
2004	P. Gal Gol C	178,17	P. Restoran	93,15
2005	P. Reklame	1303,51	P. Restoran	100,86
2006	P. Gal Gol C	152,51	P. Hotel	103,35
2007	P. Hiburan	118,38	P. Reklame	102,10
2008	P. Parkir	175,52	P. Hiburan	88,34

Sumber: Hasil Ringkasan Pengolahan Data Sekunder

Dilihat dari tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa pada tahun 2003, 2004 dan 2006 rasio pengumpulan pajak tertinggi dicapai oleh Pajak Galian Golongan C. Keseluruhan dari rasio pengumpulan pajak tertinggi atau maksimal dicapai oleh Pajak Reklame sebesar 1.303,51% pada tahun 2005. sedangkan keseluruhan dari rasio pengumpulan pajak terendah atau minimal dicapai oleh Pajak Hiburan sebesar 88,34% pada tahun 2008 dan juga bisa dikatakan belum efektif. Selain Pajak Hiburan di tahun 2008, pajak yang dikatakan belum efektif yaitu Pajak Restoran di tahun 2004 sebesar 93,15%, karena nilai rasionya masih dibawah 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan Pemerintah Daerah sebelumnya belum dapat tercapai dan belum melihat atau mensurvei terlebih dahulu potensi yang ada di daerahnya.



**Tabel 4.16. Rasio Pengumpulan Retribusi Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008**

Tahun	Maksimal		Minimal	
	Jenis Retribusi	Nilai (%)	Jenis Retribusi	Nilai (%)
2002	Dol lelang, Jemb darurat, Andang Steger Werk, Prancah Bg sting, Direksi Keet	262,82	Js Us tempat khusus parkir	94,94
2003	Dol lelang, Jemb darurat, Andang Steger Werk, Prancah Bg sting, Direksi Kit	432,82	Pel AdmUnt Mend dan leg naskah dinas	61,87
2004	Ijin Penj Kayu di luar Kaw Hutan	276,00	Js Us pmkian kekayaan daerah	49,80
2005	Pemanfaatan Sarang Walet	221,80	Js Us pmkian kekayaan daerah	62,40
2006	Pelayanan Kesehatan	205,05	Pemeriksaan kualitas susu	10,00
2007	Pelayanan Kesehatan	228,58	Pelayanan pendidikan	52,00
2008	Pelayanan Kesehatan	225,12	Parkir di tepi jalan umum	51,78

Sumber: Hasil Ringkasan Pengolahan Data Sekunder

Hampir sama dengan rasio pengumpulan pajak, rasio pengumpulan retribusi baik maksimal atau minimal tahun 2002-2008 masih didominasi jenis retribusi yang sama dari tahun ke tahun. Pada tahun 2002-2003 yang maksimal dicapai jenis retribusi Dol lelang, Jb Drtt, Andang, Steger Werk, Prnch Bg sting, Direksi Keet, sedangkan di tahun 2006-2008 dicapai retribusi Pelayanan Kesehatan. Untuk yang minimal dicapai retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah pada tahun 2004-2005. Secara keseluruhan nilai tertinggi rasio pengumpulan retribusi dicapai pada tahun 2003 dengan retribusi Dol lelang, Jb Drtt, Andang, Steger Werk, Prnch Bg sting, Direksi Keet sebesar 432,82% dan yang terendah dicapai pada tahun 2006 dengan retribusi

pemeriksaan kualitas susu sebesar 10,00% dan bisa dikatakan belum efektif.

- 2) Analisis Pertumbuhan digunakan untuk mengetahui nilai tingkat pertumbuhan masing-masing pos pajak dan retribusi daerah Kabupaten Boyolali.

**Tabel 4.17. Pertumbuhan Pajak Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008**

Tahun	Maksimal		Minimal	
	Jenis Pajak	Nilai (%)	Jenis Pajak	Nilai (%)
2003	P. Kend Tk Brmtr	135,26	ABT dan APT	- 94,47
2004	P. Kend Tk Brmtr	970.534,89	P. Restoran	- 6,19
2005	P. Gal Gol C	99,04	P. Hiburan	- 47,79
2006	P. Gal Gol C	106,95	P. Restoran	- 12,15
2007	P. Parkir	51,45	P. Restoran	7,26
2008	P. Parkir	97,89	P. Gal Gol C	- 50,52

Sumber: Hasil Ringkasan Pengolahan Data Sekunder

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2003-2004 nilai pertumbuhan pajak tertinggi di Kabupaten Boyolali dicapai pajak kendaraan tak bermotor, tahun 2005-2006 dicapai pajak galian golongan c dan di tahun 2007-2008 dicapai pajak parkir. Secara keseluruhan nilai pertumbuhan pajak tertinggi dicapai oleh pajak kendaraan tak bermotor pada tahun 2004 sebesar 970.534,89%. Untuk pertumbuhan pajak terendah dicapai oleh pajak ABT dan APT pada tahun 2003 dengan nilai negatif sebesar - 94,47%. Hal tersebut karena penurunan pertumbuhan nilai pajak daerah Kabupaten Boyolali dari tahun ke tahun yang cukup tinggi.

**Tabel 4.18. Pertumbuhan Retribusi Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008**

Tahun	Maksimal	Nilai (%)	Minimal	
	Jenis Retribusi		Jenis Retribusi	Nilai (%)
2003	Ret. Dol lelang, Jbdarurat, Andang Steger Werk, Prancah Bg sting, Direksi Keet	146,12	R. Js Us penj prod usaha daerah	- 62,44
2004	Ret. Ijin Penj kayu di luar kwsan hutan	831,18	R. Surat ijin perusahaan	- 19,13
2005	Ret. Js Us pmkian kekayaan daerah	369,56	R. Surat ijin perusahaan	- 48,41
2006	Ret. Js Us tempat khusus parkir	278,45	R. Js Us pmkian kekayaan daerah	- 71,60
2007	Ret. Pengujian & No. Kend tak brmtor	102.637	R. Pel AdmUnt Mend & leg nskh dns	- 56,37
2008	Ret. Pel AdmUnt Mend & leg nskh dns	233,86	R. Parkir di tepi jalan umum	- 49,09

Sumber: Hasil Ringkasan Pengolahan Data Sekunder

Dilihat dari tabel di atas bahwa pertumbuhan masing-masing retribusi Kabupaten Boyolali secara keseluruhan yang tertinggi dicapai pada tahun 2005 yaitu retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah dengan nilai pertumbuhan sebesar 369,56% dan yang terendah dicapai pada tahun 2006 yaitu dengan jenis retribusi yang sama dengan yang tertinggi, retribusi tersebut adalah jasa usaha pemakaian kekayaan daerah dengan nilai pertumbuhan sebesar -71,60%. Hal tersebut karena penurunan pertumbuhan nilai pajak daerah Kabupaten Boyolali dari tahun ke tahun yang cukup tinggi.

- 3) Analisis Kontribusi digunakan untuk mengetahui nilai tingkat kontribusi masing-masing pos pajak dan retribusi daerah Kabupaten Boyolali.

**Tabel 4.19. Kontribusi Pajak Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008**

Tahun	Maksimal	Nilai (%)	Minimal	Nilai (%)
	Jenis Pajak		Jenis Pajak	
2002	PPJ	90,97	P. Hiburan	0,20
2003	PPJ	95,45	P. Kend Tk Brmtr	0,08
2004	PPJ	58,94	P. Hiburan	0,08
2005	PPJ	94,08	P. Parkir	0,01
2006	PPJ	93,81	P. Parkir	0,01
2007	PPJ	93,46	P. Parkir	0,02
2008	PPJ	94,33	P. Parkir	0,04
			P. Hiburan	

Sumber: Hasil Ringkasan Pengolahan Data Sekunder

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai kontribusi realisasi pajak terhadap total pajak Kabupaten Boyolali pada tahun 2002-2008 yang tertinggi semuanya dicapai oleh pajak penerangan jalan, secara keseluruhan yang paling tinggi dicapai pada tahun 2003 dengan nilai kontribusi sebesar 95,45%. Sedangkan nilai kontribusi pajak yang terendah dicapai pada tahun 2005 dan 2006 dengan jenis kontribusi parkir sebesar 0,01%. Walaupun nilai kontribusinya terendah, tapi dari tahun 2005-2008 nilai kontribusinya terus bertambah.

**Tabel 4.20. Kontribusi Retribusi Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008**

Tahun	Maksimal		Minimal	
	Jenis Retribusi	Nilai	Jenis Retribusi	Nilai
2002	R. Pelayanan Kesehatan	70,89	R. Pelayanan pemakaman	0,01
2003	R. Pelayanan Kesehatan	74,33	R. Pelayanan pemakaman	0,01
2004	R. Pelayanan Kesehatan	72,82	R. Js Us pengol limbah cair	0,02
2005	R. Pelayanan Kesehatan	57,14	R. Js Us pengol limbah cair	0,02
			R. Pelayanan pemakaman	
2006	R. Pelayanan Kesehatan	69,29	R. Surat ijin perusahaan	0,02
			R. Pelayanan pemakaman	
2007	R. Pelayanan Kesehatan	70,23	R. Surat ijin perusahaan	0,02
			R. Pelayanan pemakaman	
2008	R. Pelayanan Kesehatan	70,37	R. Surat ijin perusahaan	0,02
			R. Pel AdmUnt Mend & leg nskh dns	

Sumber: Hasil Ringkasan Pengolahan Data Sekunder

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2002-2008 jenis retribusi yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total retribusi Kabupaten Boyolali adalah retribusi pelayanan kesehatan. Retribusi tersebut merupakan hasil dari jumlah retribusi Dinas Kesehatan Sosial (DKK) dan Badan RSU Pandan Arang. Sedangkan untuk kontribusi retribusi terendah terhadap total retribusi Kabupaten Boyolali terjadi pada tahun 2002 dan 2003 yaitu retribusi pelayanan pemakaman. Meski terendah, dari tahun ke tahun retribusi pelayanan pemakaman selalu mengalami peningkatan. Selain itu retribusi pengolahan limbah cair dan surat ijin perusahaan juga memberikan kontribusi yang rendah, hal ini terjadi karena di Kabupaten Boyolali keadaan geografis dan topografisnya yang masih banyak lahan pertanian, sehingga banyak penduduknya yang masih bermata pencaharian

sebagai petani bukan sebagai buruh atau karyawan pabrik. Hal itu juga menyebabkan sedikitnya pabrik yang ada di Kabupaten Boyolali sehingga kontribusi retribusi surat ijin perusahaan menjadi rendah.

Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan dan kontribusi pajak dan retribusi daerah di atas, maka dapat diketahui manakah dari masing-masing pos pajak dan retribusi daerah yang termasuk dalam kategori prima, potensial, berkembang, atau terbelakang. Untuk menghitungnya dapat dilihat melalui tabel berikut:

**Tabel 4.21. Matrik Potensi Jenis Pajak dan Retribusi Daerah**

PROPORSI PERTUMBUHAN	$\frac{x_i}{rata - rata} \geq 1$	$\frac{x_i}{rata - rata} < 1$
$\frac{\Delta x_i}{\Delta X_{total}} \geq 1$	PRIMA	BERKEMBANG
$\frac{\Delta x_i}{\Delta X_{total}} < 1$	POTENSIAL	TERBELAKANG

Ket:  $x_i$  = jenis pajak atau retribusi daerah

Sumber: Mulyanto (2001). Identifikasi dan Analisis Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Eks Karisidenan Surakarta, hal 24-25.

Setelah dihitung dengan melihat tabel di atas, maka berdasarkan matrik potensi dari tiap-tiap pos pajak dan retribusi daerah didapatkan hasil sebagai berikut :



**Tabel 4.22. Matrik Potensi Pajak Kabupaten Boyolali**

<b>Jenis Pajak</b>	<b>Kategori</b>
P. Hotel	Berkembang
P. Restoran	Berkembang
P. Hiburan	Terbelakang
P. Reklame	Berkembang
PPJ	Prima
P. Gal Gol C	Terbelakang
P. Parkir	Berkembang

Sumber: Hasil Ringkasan Pengolahan Data Sekunder

Dari matrik potensi pajak di atas yang dikategorikan berkembang adalah pajak hotel, restoran, reklame dan parkir. Hal itu disebabkan karena rasio pertumbuhan pajak-pajak tersebut terhadap pertumbuhan total pajak nilainya lebih dari 1, tetapi rasio proporsinya terhadap rerata proporsi tiap-tiap pajak nilainya kurang dari 1. Sedangkan untuk pajak yang dikategorikan prima adalah pajak penerangan jalan (PPJ), karena rasio pertumbuhan PPJ terhadap pertumbuhan total pajak dan rasio proporsinya terhadap rerata proporsi nilainya lebih dari 1. Untuk pajak yang dikategorikan terbelakang adalah pajak hiburan dan galian golongan c, karena rasio pertumbuhannya terhadap pertumbuhan total pajak dan rasio proporsinya terhadap rerata proporsi tiap-tiap pajak nilainya kurang dari 1.

**Tabel 4.23. Matrik Potensi Retribusi Kabupaten Boyolali**

<b>Jenis Retribusi</b>	<b>Kategori</b>
Ret. Pelayanan Kesehatan	
- Dinas Kesehatan Sosial (DKK)	Potensial
- Badan RSU Pandan Arang	Prima
Ret. Pel Persampahan & Kebersihan	Terbelakang
Ret. Bea Cetak KTP/KK	Prima
Ret. Bea Cetak akte capil	Terbelakang
Ret. Pelayanan pemakaman	Berkembang
Ret. Parkir di tepi jalan umum	Terbelakang
Ret. Pelayanan pasar	Potensial
Ret. Pengujian kendaraan bermotor	Terbelakang
Ret. Pemeriksaan alat pmdm kbkran	Berkembang
Ret. Pelayanan pendidikan	Berkembang
Ret. Pelayanan askeskin	Potensial
Ret. Pasar grosir/Pertokoan	Terbelakang
Ret. Js Us pmkian kekayaan daerah	Potensial
Ret. Jasa usaha terminal	Terbelakang
Ret. Js Us tempat khusus parkir	Terbelakang
Ret. Js Us rumah potong hewan	Terbelakang
Ret. Js Us tmpt rekreasi & ol raga	Terbelakang
Ret. Js Us pengol limbah cair	Terbelakang
Ret. Js Us penj prod usaha daerah	Berkembang
Ret. Ijin mendirikan bangunan (IMB)	Terbelakang
Ret. Ijin gangguan	Berkembang
Ret. Tempat usaha	Berkembang
Ret. Ijin Trayek	Terbelakang
Ret. Surat ijin usaha perdagangan	Terbelakang
Ret. Rice mill/ijin usaha perusahaan	Terbelakang
Ret. Tanda daftar perusahaan	Berkembang
Ret. Surat ijin perusahaan	Terbelakang
Ret. Tanda daftar gudang	Berkembang
Ret. Pel AdmUnt Mend & leg nskh dns	Terbelakang
Ret. Ijin Penj kayu di luar kwsan hutan	Terbelakang
Ret. Dol lelang, Jemb darurat, Andang	Terbelakang
Steger Werk, Perancah Bg sting &	
Direksi Keet	
Ret. Pemeriksaan kualitas susu	Terbelakang
Ret. Pelayanan insimenasi buatan	Berkembang
Ret. Pelayanan kesehatan hewan	Terbelakang
Ret. Pengujian & No. Kend tak brmtor	
Ret. Pemanfaatan sarang walet	
Ret. Pelayanan kesehatan swasta	Terbelakang

Sumber: *BPS* Kabupaten Boyolali, Hasil Ringkasan Pengolahan Data Sekunder

Dilihat dari tabel di atas hanya ada 2 jenis retribusi yang dikategorikan prima yaitu retribusi pelayanan kesehatan dari badan RSU pandan arang dan retribusi biaya cetak KTP/KK. Untuk retribusi yang dikategorikan potensial adalah retribusi pelayanan kesehatan dari dinas kesehatan sosial (DKK), retribusi pelayanan pasar, retribusi pelayanan askeskin dan retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah. Untuk retribusi yang dikategorikan berkembang adalah retribusi pelayanan pemakaman, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, pelayanan pendidikan, ijin gangguan, tempat usaha, tanda daftar perusahaan, tanda daftar gudang dan pelayanan insimenasi buatan. Selain retribusi yang disebutkan di atas adalah retribusi yang dikategorikan terbelakang.

**f. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemandirian daerah dengan pola hubungannya digunakan untuk mengetahui besarnya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat serta untuk menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Kemandirian daerah dan pola hubungan Kabupaten Boyolali dapat dihitung dengan membandingkan penerimaan PAD terhadap penerimaan bantuan dan sumbangan daerah. Selain itu adanya potensi SDA dan SDM yang berbeda akan menyebabkan perbedaan dalam

tingkat kemandirian daerah dan pola hubungan antar daerah terhadap Pemerintah Pusat.

Untuk mengetahui pola hubungan kemandirian daerah dari sisi keuangannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.24. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah**

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	<b>Instruktif</b> <b>Konsultatif</b> <b>Partisipatif</b> <b>Delegatif</b>
Rendah	25% - 50%	
Sedang	50% - 75%	
Tinggi	75% - 100%	

Sumber: Nataluddin dalam Abdul Halim, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, 2004.

Dilihat dari hasil perhitungan tingkat kemandirian daerah Kabupaten Boyolali pada tahun 2002-2008 dapat diketahui pada tabel berikut :

**Tabel 4.25. Tingkat Kemandirian, Kemampuan Keuangan dan Pola Hubungan Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008**

Tahun	Rs. Kemandirian	Kemandirian Keu	Pola Hubungan
2002	8,75	Rendah Sekali	Instruktif
2003	9,64	Rendah Sekali	Instruktif
2004	10,66	Rendah Sekali	Instruktif
2005	13,60	Rendah Sekali	Instruktif
2006	10,90	Rendah Sekali	Instruktif
2007	11,09	Rendah Sekali	Instruktif
2008	9,32	Rendah Sekali	Instruktif
	<b>10,56</b>	<b>Rendah Sekali</b>	<b>Instruktif</b>

Sumber: Hasil Ringkasan Pengolahan Data Sekunder

Dilihat dari tabel di atas bahwa kemandirian daerah Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat masih sangat rendah dari sisi pembiayaannya. Hal tersebut dilihat dari kemandirian keuangan daerah yang rendah sekali dan pola hubungannya instruktif yang berarti peranan Pemerintah Pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah (Daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Dari tahun 2005-2008 rasio kemandirian Kabupaten Boyolali cenderung mengalami penurunan, sempat naik pada tahun 2007 kemudian turun lagi. Hal ini disebabkan karena nilai rata-ratanya masih dibawah 25%.

#### **g. Kemampuan Pinjaman Daerah**

Ada dua persyaratan atau ketentuan bagi daerah yang melakukan pinjaman jangka panjang yaitu sebagai berikut:

##### **1. Jumlah Kumulatif Pokok Pinjaman Daerah**

Jumlah Kumulatif Pokok Pinjaman Daerah yang wajib dibayar dalam menghitung kemampuan pinjaman daerah tidak boleh melebihi 75% dari jumlah Perkiraan Umum APBD tahun sebelumnya (Bratakusumah dan Solihin; 193). Persyaratan pinjaman tersebut juga diatur dalam pasal 54 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Jumlah Kumulatif Pokok Pinjaman Daerah yang wajib dibayar adalah jumlah pokok pinjaman lama ditambah dengan jumlah

*commit to user*

pokok pinjaan yang akan diterima. Sedangkan untuk Penerimaan Umum APBD adalah seluruh Penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, Dana Pinjaman Lama dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu. Hasil perhitungan Jumlah Kumulatif Pokok Pinjaman Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.26. Jumlah Kumulatif Pokok Pinjaman Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kumulatif Pokok Pinjaman Daerah %</b>
2002	-
2003	0,16
2004	0,13
2005	0,10
2006	0,14
2007	0,09
2008	0,08
<b>Rerata</b>	<b>0,12</b>

Sumber: *DPPKAD* Kabupaten Boyolali, Hasil Ringkasan Pengolahan Data Sekunder

Pada tabel diatas dapat diketahui rata-rata Jumlah Kumulatif Pokok Pinjaman Daerah Kabupaten Boyolali pada tahun 2002-2008 adalah sebesar 0,12%. Besarnya tersebut masih relatif kecil dibawah 30% dibandingkan dengan batasan 75% sebagaimana telah diatur dalam pasal 54 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, terlihat bahwa Jumlah Kumulatif Pokok Pinjaman Daerah cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Boyolali memiliki peluang



untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan daerah dengan melakukan pinjaman daerah jangka panjang masih cukup terbuka lebar dan memungkinkan untuk melakukan pinjaman daerah sebagai alternatif pengembangan sumber pembiayaan daerah dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

## 2. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Kemampuan daerah dalam mendapatkan pinjaman daerah jangka panjang menurut pasal 54 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, dalam PP No. 107 Tahun 2000 bahwa batasan DSCR adalah minimal 2,5. DSCR menunjukkan kemampuan keuangan daerah untuk membayar pokok pinjaman dan bunganya, yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagian Daerah (BD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi Belanja Wajib, kemudian dibagi dengan jumlah Angsuran Pokok Pinjaman, Bunga Pinjaman, dan Biaya Lain (biaya komitmen, biaya bank, dan lain-lain) yang Jatuh Tempo. Hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.27. DSCR Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008**

<b>Tahun</b>	<b>DSCR</b>
2002	415,17
2003	1.171,89
2004	792,96
2005	(-) 950
2006	3.279,08
2007	45,00
2008	40,57
<b>Rerata</b>	<b>684,95</b>

Sumber: *DPPKAD* Kabupaten Boyolali, Hasil Ringkasan Pengolahan Data Sekunder

Dilihat dari tabel di atas rata-rata DSCR Kabupaten Boyolali tahun 2002-2008 adalah sebesar 684,95, hasil tersebut masih lebih besar dibandingkan dengan ketentuan batas minimal DSCR sebesar 2,5. hal itu menunjukkan bahwa Kabupaten Boyolali belum bisa memanfaatkan sumber penerimaan yang berasal dari pinjaman daerah terutama pinjaman jangka panjang sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan daerah dari pusat. Dengan mengoptimalkan pinjaman daerah, maka pinjaman tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan PAD.

Hal yang menyebabkan daerah belum bisa mengoptimalkan pinjaman daerah antara lain karena lemahnya kinerja BUMD dalam menjalankan usahanya sehingga sering merugi sehingga menunggak mengembalikan pinjaman, juga karena sumber dana dari penerbitan obligasi daerah belum dapat dimanfaatkan karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan dan pemerintah daerah. Selanjutnya adalah belum terbentuknya lembaga pasar

modal yang mampu menyediakan dana yang murah dan mudah diperoleh oleh pemerintah daerah, hal ini yang mengakibatkan daerah masih tergantung pada pemerintah pusat dalam memperoleh pinjaman daerah.

### 3. Jumlah Maksimal Angsuran Pokok Pinjaman

Jumlah maksimal angsuran pokok pinjaman dapat dihitung dengan menjumlahkan PAD, BD, DAU yang kemudian dikurangi dengan BW dan hasilnya dibagi dengan batas minimal DSCR yaitu 2,5.

**Tabel. 4.28. Jumlah Maksimal Angsuran Pokok Pinjaman Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008**

Tahun	Maks Angs Pok Pinjaman
2002	19.600.455.850
2003	20.506.954.160
2004	13.876.114.490
2005	Tdk Bs Meminjam
2006	62.273.207.930
2007	59.115.752.760
2008	35.189.165.060

Sumber: *DPPKAD* Kabupaten Boyolali, Hasil Ringkasan Pengolahan Data Sekunder

Dilihat dari tabel 4.28 bahwa pada tahun 2005 Kabupaten Boyolali tidak bisa melakukan angsuran pokok pinjaman dikarenakan nilai DSCR di tahun tersebut bernilai negatif, yaitu sebesar (- 950).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab IV, dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

##### 1. Analisis Deskriptif

###### a. Analisis Surplus/Defisit (Pertumbuhan APBD)

Hasil perhitungan APBD Kabupaten Boyolali tahun 2002 sampai 2008 bahwa menurut pendekatan dasar (PP No. 5 Tahun 2005) anggarannya bisa dikatakan memenuhi kriteria karena di tahun 2002, 2004, 2005 dan 2006 anggaran mengalami surplus, sedangkan di tahun 2003, 2007 dan 2008 anggaran mengalami defisit tetapi tidak melebihi 5% dari total pendapatan. Menurut pendekatan lanjutan (PMK No. 72 Tahun 2006) anggaran tahun 2002 sampai 2008 sudah memenuhi kriteria karena mengalami surplus.

###### b. Kontribusi PAD terhadap APBD

Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Boyolali tahun 2002-2005 terus mengalami peningkatan. Tapi di tahun berikutnya 2006-2008 kontribusi PADnya semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa ada kontribusi selain PAD yang besar dalam menyumbang pendapatan daerah seperti dari pemerintah pusat.

## 2. Analisis Kuantitatif

### a. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

Dari perhitungan DDF, yaitu rasio antara PAD, BHPBP dan SBD terhadap TPD memperlihatkan bahwa dari rerata tahun 2002-2008 nilai perbandingan antara SBD terhadap TPD sangat besar dibanding PAD dan BHPBP terhadap TPD dengan nilai yang lebih dari 50%. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali terhadap Pemerintah Pusat masih sangat tinggi dan bisa dikatakan belum mandiri.

### b. Derajat Otonomi Fiskal (DOF)

DOF Kabupaten Boyolali pada tahun 2006-2008 cenderung mengalami penurunan. Dilihat dari reratanya DOF Kabupaten Boyolali sebesar 7,53%. Hal ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat cenderung masih rendah karena kurang dari 50%.

### c. Upaya Fiskal

Dari perhitungan upaya fiskal Kabupaten Boyolali dengan mencari elastisitas PAD terhadap PDRB dengan pertumbuhannya, maka dengan menggunakan PDRB ADHB laju pertumbuhan PDRB terhadap peningkatan PAD sebesar 1,97% berarti jika PDRB naik 1% maka PAD akan meningkat sebesar 1,97%. Bila menggunakan PDRB ADHK laju pertumbuhan PDRB terhadap peningkatan PAD sebesar

4,41 berarti jika PDRB naik 1% maka PAD akan meningkat sebesar 4,41%.

#### d. Rasio Efektivitas

Dilihat dari rerata bagian pos-pos penyusunan PAD yang terdiri dari pajak, retribusi, laba usaha daerah dan lain-lain PAD sah, PAD Kabupaten Boyolali tahun 2002-2008 dapat dikategorikan sudah efektif karena rasio antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya lebih besar dari 100%.

#### e. Indeks Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah

Dilihat dari hasil perhitungan analisis rasio pengumpulan pajak/retribusi daerah dan tingkat pertumbuhan dan proporsi dari tiap-tiap pos pajak dan retribusi daerah terhadap total pajak maupun total retribusi, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

##### 1) Pajak Daerah

Kategori Pajak Daerah:

- a. **Prima:** pajak penerangan jalan (PPJ).
- b. **Berkembang:** pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir.
- c. **Terbelakang:** pajak hiburan dan pajak galian golongan c.

##### 2) Retribusi Daerah

Kategori Retribusi Daerah:

- a. **Prima:** retribusi pelayanan kesehatan bagian RSUD pandan arang dan retribusi biaya cetak KTP/KK.

*commit to user*



- b. **Potensial:** retribusi pelayanan kesehatan bagian dinas kesehatan sosial (DKK), retribusi pelayanan pasar, retribusi pelayanan askeskin dan jasa usaha pemakaian kekayaan daerah.
- c. **Berkembang:** retribusi pelayanan pemakaman, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, pelayanan pendidikan, jasa usaha penjualan produksi usaha daerah, ijin gangguan, tempat usaha, tanda daftar perusahaan, tanda daftar gudang dan pelayanan inseminasi buatan.
- d. **Terbelakang:** retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, bea cetak akte capil, parkir di tepi jalan umum, pengujian kendaraan bermotor, pasar grosir/pertokoan, jasa usaha terminal, jasa usaha khusus tempat parkir, jasa usaha rumah potong hewan, jasa usaha tempat rekreasi & olahraga, jasa pengolahan limbah cair, IMB, ijin trayek, surat ijin usaha perdagangan, ijin usaha perusahaan, surat ijin perusahaan, AdmUnt Mend & leg naskah, ijin penjualan kayu diluar kawasan hutan, dol lelang; jembatan darurat; andang; steger werk; perancah begisting; direksi keet, pemeriksaan kualitas susu, pelayanan kesehatan hewan dan pelayanan kesehatan swasta.

#### f. **Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemandirian daerah dengan pola hubungannya yang menggambarkan besarnya ketergantungan keuangan Pemerintah

*commit to user*

Daerah terhadap Pemerintah Pusat dihitung dengan membandingkan penerimaan PAD terhadap penerimaan bantuan dan sumbangan daerah. Rasio kemandirian daerah dan pola hubungan Kabupaten Boyolali tahun 2002-2008 secara rerata nilainya sebesar 10,56% karena nilainya yang terletak antar 0%-25%, maka Kabupaten Boyolali bisa dikatakan memiliki kemampuan keuangan daerah yang rendah sekali dan mempunyai pola hubungan yang instruktif dimana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah.

**g. Kemampuan Pinjaman Daerah**

Dari hasil perhitungan kemampuan pinjaman jangka panjang daerah Kabupaten Boyolali dapat dikatakan Kabupaten Boyolali masih bisa mengembangkan sumber-sumber pembiayaan daerah untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap pusat melalui pinjaman jangka panjang tersebut. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan Jumlah Kumulatif Pokok Pinjaman Daerah yang hasil rata-ratanya lebih kecil dibandingkan dengan ketentuan batas sebesar 75%. Sedangkan untuk DSCR hasil rata-ratanya masih lebih besar dari ketentuan batas minimal sebesar 2,5. Sedangkan untuk Jumlah Maksimal Angsuran Pokok Pinjaman, Kabupaten Boyolali pada tahun 2005 tidak bisa melakukan angsuran pokok pinjaman dikarenakan nilai DSCR di tahun tersebut bernilai negatif, yaitu sebesar (- 950).

## B. Saran

Dari kesimpulan di atas, saran yang dapat diambil terkait dengan studi Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Era Otonomi Daerah Di Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut:

1. Pengoptimalan sumber-sumber penerimaan seperti pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan PAD.
2. Pengembangan obyek-obyek wisata Boyolali untuk mendatangkan retribusi daerah yang cukup besar atau digunakan untuk investasi BUMD.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui PDRB dari para investor yang masuk ke daerah yang dampaknya terhadap peningkatan pendapatan perkapita masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak.
4. Perbaiki kinerja BUMD agar lebih profesional dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan PAD.
5. Membentuk lembaga pasar modal untuk menyediakan dana yang murah dan mudah diperoleh pemerintah daerah.
6. Mengoptimalkan pinjaman daerah sebagai sumber penerimaan daerah yang digunakan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, agar tidak tergantung sumber penerimaan dari pusat. Akan tetapi pinjaman daerah tersebut tidak sampai membebani APBD pada tahun berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2001. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Anggaran Daerah dan "Fiscal Stress"*. Vol. 16, No. 4, 346-357
- Abdul Halim. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Alfian Mujiwardhani. 2008. "*Analisis Kemandirian Daerah Kabupaten Cilacap Sebelum dan Selama Otonomi Daerah (Tinjauan Keuangan Daerah)*". Skripsi FE UNS Surakarta. Tidak Dipublikasikan.
- Ana Prihatiningsih. 2010. "*Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Surakarta*". Skripsi FE UNS Surakarta. Tidak Dipublikasikan.
- Baban Sobandi, et al. 2006. *Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah*. Bandung: Humaniora Anggota IKAPI.
- Bachrul Elmi. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia*. UI-Pres. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2002-2008. *Boyolali Dalam Angka*.
- Bratakusumah dan Solihin. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- DPPKAD. 2002-2008. *Target dan Realisasi APBD Boyolali*.
- Dwi Prasetyani. 2005. *Jurnal Kemampuan Propinsi Jawa Timur dalam melakukan Pinjaman Daerah Ditinjau dari Aspek Keuangan*. Vol 10, No. 2, 221-228.
- Fatima Zahra. 2008. "*Analisis Keuangan Daerah di Kabupaten Karanganyar Perbandingan Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (1994/1995-2006)*". Skripsi FE UNS Surakarta. Tidak Dipublikasikan.
- Josef Riwu Kaho. 1998. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Indonesia (Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andhi.
- Mudrajad Kuncoro. 1995. "*Desentralisasi Fiskal di Indonesia: Dilema Otonomi dan Ketergantungan*". Prisma, No. 4, 3-17.
- Mudrajad Kuncoro. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Lakant: Erlangga.
- Muhammad Ilham Ramadhani. 2009. "*Analisis Kinerja Keuangan Daerah dan Kapasitas Pinjaman Daerah Sebelum dan Pada Masa Otonomi Daerah di Kota Depok 1997/1998-2008*". Skripsi FE UNS Surakarta. Tidak Dipublikasikan.

- Mulyanto. 2001. ***“Identifikasi dan Analisis Potensi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah di Eks-Karisidenan Surakarta”***. Usul Penelitian Dosen Muda FE UNS Surakarta.
- Mulyanto. 2004. ***Pembangunan Daerah dan Indikator Kemajuan Pembangunan Daerah di Era Otonomi***. Suplemen Mata Kuliah Ekonomi Regional Fakultas Ekonomi UNS. Surakarta.
- Republik Indonesia: **Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. No. 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437).**
- Republik Indonesia: **Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.** Bandung: Citra Umbara.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK No. 72, Tahun 2006)**
- Republik Indonesia: **PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 202, Tambahan Lembaran Negara. No. 4022).**
- Republik Indonesia: **PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005. No. 140).**
- Republik Indonesia: **PP No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.**
- Winarna Surya Adisubrata. 2003. ***Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia (Sejak Proklamasi Sampai Awal Reformasi)***. Semarang: CV Aneka Ilmu.



## LAMPIRAN

**TABEL 1. Analisis Surplus/Defisit APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008 Menurut Pendekatan Dasar (PP No. 58 Tahun 2005)**

Tahun	Pendapatan Daerah	Belanja Daerah	Surplus/Defisit
2002	325.257.089.102	287.269.875.585	37.987.213.517
2003	389.246.882.291	390.543.661.686	(1.296.779.400)
2004	403.049.052.311	395.692.549.618	7.356.502.700
2005	439.245.327.765	427.428.312.570	1.181.701.520
2006	630.290.112.803	530.074.202.239	1.002.159.106
2007	707.982.616.528	738.497.675.773	(3.051.506.920)
2008	782.528.354.413	793.262.107.869	(1.073.375.340)

**TABEL 2. Analisis Surplus/Defisit APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008 Menurut Pendekatan Sesuai (PMK No. 72 Tahun 2006)**

Tahun	Pendapatan Daerah	Belanja Daerah	Silpa	Pencairan Dana Cadangan	Surplus/Defi
2002	325.257.089.102	287.269.875.585	14.747.069.678	0	52.734.283.7
2003	389.246.882.291	390.543.661.686	39.719.462.091	0	38.422.682.6
2004	403.049.052.311	395.692.549.618	30.615.051.022	0	37.971.553.7
2005	439.245.327.765	427.428.312.570	36.811.306.043	0	37.993.007.5
2006	630.290.112.803	530.074.202.239	44.028.253.565	0	45.030.412.6
2007	707.982.616.528	738.497.675.773	139.080.981.579	0	136.029.474.6
2008	782.528.354.413	793.262.107.869	94.362.883.685	0	93.289.508.3

**TABEL 3. Kontribusi PAD terhadap Total Penerimaan APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008**

Tahun	PAD	APBD	Kontribusi %
2002	24.460.325.825	612.526.964.687	3,99
2003	32.781.305.308	779.790.543.977	4,20
2004	36.970.682.463	798.741.601.929	4,63
2005	49.816.906.083	866.673.640.335	5,75
2006	59.307.283.906	1.160.364.315.042	5,11
2007	67.437.551.010	1.446.480.292.301	4,66
2008	63.733.408.461	1.575.790.462.282	4,04
Rerata			4,62



TABEL 4. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008

Tahun	PAD	BHPBP	SBD	TPD	DDF (%)		
					PAD/TPD	BHPBP/TPD	SBD
2002	24.460.325.825	21.408.938.302	279.387.824.975	325.257.089.102	7,52	6,58	85
2003	32.781.305.308	16.378.109.405	340.087.467.578	389.246.882.291	8,42	4,21	87
2004	36.970.682.463	19.384.907.368	346.693.462.480	403.049.052.311	9,17	4,81	86
2005	49.816.906.083	23.131.628.141	366.296.793.541	439.245.327.765	11,34	5,27	83
2006	59.307.283.906	27.101.496.732	543.881.332.165	630.290.112.803	9,41	4,29	86
2007	67.437.551.010	32.408.581.395	608.136.484.123	707.982.616.528	9,52	4,58	85
2008	63.733.408.461	34.917.443.393	683.877.502.559	782.528.354.413	8,14	4,46	87
Rerata					9,07	4,88	86

TABEL 5. Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Total Belanja	DOF (%)
2002	4.334.366.800	15.265.694.973	287.269.875.585	6,82
2003	5.820.775.186	20.189.284.372	390.543.661.686	6,66
2004	7.244.100.746	25.189.617.738	395.692.549.618	8,19
2005	6.984.060.197	34.579.914.970	427.428.312.570	9,72
2006	9.442.747.838	33.628.502.085	530.074.202.239	8,12
2007	10.619.322.722	40.020.935.424	738.497.675.773	6,86
2008	11.155.035.906	38.959.749.828	793.262.107.869	6,32
Rerata				7,53

TABEL 6. Upaya/Posisi Fiskal (Tax Effort) Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008

Tahun	PAD	% Pert PAD	PDRB HB	% Pert PDRB HB	PDRB HK	% Per I
2002	24.460.325.825	-	3.805.251.332	-	3.062.304.146	
2003	32.781.305.308	34,02	4.039.667.440	6,16	3.211.066.499	4
2004	36.970.682.463	12,77	4.250.098.734	5,20	3.320.736.810	3
2005	49.816.906.083	34,74	4.639.506.251	9,16	3.456.062.124	4
2006	59.307.283.906	19,05	5.142.433.034	10,84	3.600.897.968	4
2007	67.437.551.010	13,70	5.708.063.971	11,00	3.747.733.278	4
2008	63.733.408.461	(5,49)	6.446.546.368	12,93	3.899.372.858	4
Rerata		18,13		9,21		4

**TABEL 7. Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008**

Tahun		PAD			
		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Laba Usaha Daerah	Lain-lain PAD Sah
2002	Target	3.679.918.000	15.078.875.000	313.828.000	2.844.069.000
	Realisasi	4.334.366.800	15.265.694.973	311.686.188	4.548.577.864
	Rs.Efektivitas	117,78	101,24	99,32	159,93
2003	Target	5.686.644.000	18.217.288.050	337.290.049	5.752.962.894
	Realisasi	5.820.775.186	20.189.284.372	337.290.049	6.433.955.701
	Rs.Efektivitas	102,36	110,82	100,00	111,84
2004	Target	6.050.735.000	24.453.504.140	514.397.700	2.801.086.582
	Realisasi	7.244.100.746	25.189.617.738	515.467.923	4.021.496.056
	Rs.Efektivitas	119,72	103,01	100,21	143,57
2005	Target	6.676.973.800	36.901.388.440	3.106.432.199	3.694.309.967
	Realisasi	6.984.060.197	34.579.914.970	3.426.513.217	4.826.417.699
	Rs.Efektivitas	104,59	93,71	110,30	130,64
2006	Target	7.558.081.000	32.382.522.190	2.418.216.812	10.128.428.700
	Realisasi	9.442.747.838	33.628.502.085	2.420.450.731	13.815.583.252
	Rs.Efektivitas	124,93	103,85	100,09	136,40
2007	Target	9.642.340.000	36.765.424.000	2.114.979.000	12.924.104.000
	Realisasi	10.619.322.722	40.020.935.424	2.185.224.113	14.612.068.751
	Rs.Efektivitas	110,13	108,85	103,32	113,06
2008	Target	10.649.690.000	35.227.506.000	2.719.004.000	10.027.525.000
	Realisasi	11.155.035.906	38.959.749.828	2.752.499.538	10.866.123.189
	Rs.Efektivitas	104,74	110,59	101,23	108,36
<b>Rerata</b>	<b>Rs. Efektivitas</b>	<b>112,03</b>	<b>104,58</b>	<b>102,07</b>	<b>129,11</b>

**TABEL 8. Target dan Realisasi Pajak abupaten Boyolali Tahun 2002-2008 dalam (000)**

Tahun		Jenis Pajak					
		P. Kend Tk Brmtr	BBNKB	PBBKB	P. Hotel	P. Restoran	P. Hiburan
2002	Target	175			121.450		8 550
	Realisasi	190			122.553		8.555,6
2003	Target	375	-	-	34 700	92 600	8 550
	Realisasi	447	-	-	36.444	93.644	10.005
2004	Target	2.693.788	-	-	37 900	94 300	6 270
	Realisasi	4.338.738	-	-	42.738	87.843	10.243
2005	Target	-	-	-	41.807	94 700	4 950
	Realisasi	-	-	-	46.675	95.516	5.348
2006	Target	-	-	-	46.296	80 250	4 950
	Realisasi	-	-	-	47.847	83 910	5 250
2007	Target	-	-	-	48.046	82 850	4 950
	Realisasi	-	-	-	56.865	90.003	5 860
2008	Target	-	-	-	57 300	85 500	4 590
	Realisasi	-	-	-	60.585	94.923	4.055

**TABEL 9. Rasio Pengumpulan Pajak Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008**

Tahun	P. Kend Tk Brmtr	Jenis Pajak					
		BBNKB	PBBKB	P. Hotel	P. Restoran	P. Hiburan	P. Reklame
2002	108,57			100,91		100,06	102,86
2003	119,2	-	-	105,02	101,17	117,01	100
2004	161,06	-	-	112,76	93,15	163,36	100
2005	-	-	-	111,64	100,86	108,04	1303,51
2006	-	-	-	103,35	104,56	106,06	138,23
2007	-	-	-	118,35	108,63	118,38	102,10
2008	-	-	-	105,73	111,02	88,34	136,16
<b>Rerata</b>	<b>129,61</b>			<b>196,73</b>		<b>114,46</b>	<b>283,26</b>

**TABEL 10. Pertumbuhan Pajak terhadap Total Pajak Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008**

Tahun	Jenis Pajak							
	P. Kend Tk Bermotor	BBNKB	PBBKB	P. Hotel	P. Restoran	P. Hiburan	P. Reklame	PPJ
2002	-	-	-	-	-	-	-	-
2003	135,26	-	-	6,15	-	16,94	0	41,12
2004	970.534,89	-	-	17,27	(6,19)	2,38	0,28	25,08
2005	-	-	-	9,21	8,73	(47,79)	70,61	(5,59)
2006	-	-	-	2,51	(12,15)	(1,83)	23,59	34,82
2007	-	-	-	18,84	7,26	11,62	34,63	12,04
2008	-	-	-	6,54	5,47	(30,80)	48,14	6,02
<b>Rerata</b>	<b>485.335,07</b>			<b>10,60</b>		<b>(49,48)</b>	<b>29,54</b>	<b>18,91</b>

**TABEL 11. Proporsi/Kontribusi Pajak terhadap Total Pajak Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008**

Tahun	Jenis Pajak							
	P. Kend Tk Bermotor	BBNKB	PBBKB	P. Hotel	P. Restoran	P. Hiburan	P. Reklame	PPJ
2002	0,44	-	-	2,83	-	0,20	1,66	90,97
2003	0,77	-	-	0,62	1,61	0,17	1,24	95,45
2004	36,75	-	-	0,36	0,74	0,08	0,61	58,94
2005	-	-	-	0,67	1,37	0,07	1,76	94,08
2006	-	-	-	0,51	0,89	0,05	1,61	93,81
2007	-	-	-	0,53	0,85	0,05	1,93	93,46
2008	-	-	-	0,54	0,85	0,04	2,72	94,33
<b>Rerata</b>	<b>12,65</b>			<b>1,77</b>		<b>0,09</b>	<b>1,65</b>	<b>88,72</b>

**TABEL 12. Matriks Potensi Pajak Kabupaten Boyolali**

Jenis Pajak	Pertumbuhan	Proporsi/Kontribusi	Pert Pjk/Pert tot Pjk	Prop Pjk/Rerata	Kategori
P. Hotel	6,54	0,54	1,30	0,037	Berke
P. Restoran	5,47	0,85	1,08	0,059	Berke
P. Hiburan	(30,80)	0,04	(6,11)	0,003	Terbe
P. Reklame	48,14	2,72	9,55	0,190	Berke
PPJ	6,02	94,33	1,19	6,605	Pri
P. Gal GolC	(50,52)	1,48	(10,02)	0,103	Terbe
ABTdanAPT	-	-	-	-	
P. Parkir	97,89	0,04	19,42	0,003	Berke
	<b>5,04</b>	<b>14,28</b>			

TABEL 13. Target Retribusi Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008 dalam (000) Rp

Klasifikasi Jenis Retribusi	Tahun					
	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Ret. Pelayanan Kesehatan	11 005 680					
- Dinas Kesehatan Sosial (DKK)		2.932.596	3.332.596	3.987.896	4.206.788	2.541.788
- Badan RSUD Pandan Arang		10.693.954	3 163 850	14.345.678	17.529.790	19.450.627
Ret. Pel Persampahan & Kebersihan	214.091	240.699,95	251.646	255.641	282.979	267.908
Ret. Bea Cetak KTP/KK	601 250	270 000	270 000	575 000	2 411 250	1 075 000
Ret. Bea Cetak akte capil		318 750	200 000	279 000	250 000	250 950
Ret. Pelayanan pemakaman	2 000	3 000	4 500	5 000	6 500	6 500
Ret. Parkir di tepi jalan umum	35.422	37.576,8	40.648	43 320	107.444	111.324
Ret. Pelayanan pasar	1.129.319	1.342.232,8	1.338.458	1.421.209	1.618.515	1.580.547
Ret. Pengujian kendaraan bermotor	284.292	307.205	316.885	351.105	351.105	397.375
Ret. Pemeriksaan alat pmdm kbkran	500	550	550	1 000	1 000	1 000
Ret. Pelayanan pendidikan	0	0	0	0	0	1.375
Ret. Pelayanan askeskin	0	0	0	0	0	0
Ret. Pasar grosir/Pertokoan	0	0	0	0	0	157.861
Ret. Js Us pmkian kekayaan daerah	347.596	455.537	3.434.603	12.871.923	2.794.845	1 838 000
Ret. Jasa usaha terminal	222.304	236.007	262.188	262.188	450.756	514.698
Ret. Js Us tempat khusus parkir	22 440	19 980	18 740	22 610	93.004	99.036
Ret. Js Us rumah potong hewan	481 750	486 750	445 000	467 250	380 000	461 500
Ret. Js Us tmpt rekreasi & ol raga	185.468	217 250	338 570	452.556	383 400	418 000
Ret. Js Us pengol limbah cair	5 050	5 500	5 000	6.025	6 050	3 500
Ret. Js Us penj prod usaha daerah	39.768	15 000	15 000	15 000	17 000	18 000
Ret. Ijin mendirikan bangunan (IMB)	152 560	229.626	278.944	597.154	295.722	340 000
Ret. Ijin gangguan	110 000	140 000	200 000	337 500	300 000	300 000
Ret. Tempat usaha				12 500	25 000	20 000
Ret. Ijin Trayek	12.189	17.475	21 200	25 450	25 450	25.475
Ret. Surat ijin usaha perdagangan	34 000	0	0	18 350	18 000	19.975
Ret. Rice mill/ijin usaha perusahaan	21 000	21 000	25 000	25 000	25 000	26 000
Ret. Tanda daftar perusahaan	23 000	11 840	8 880	14 500	14 000	15 000
Ret. Surat ijin perusahaan	0	20 000	10 000	10 020	5 000	5 000
Ret. Tanda daftar gudang	1 000	700	500	600	600	500
Ret. Pel AdmUnt Mend & leg nskh dns	41.696	111.058,5	65.869	41.287	31.445	9 300
Ret. Ijin Penj kayu di luar kwsan hutan	11 000	15 000	75 000	140 000	295 000	200 000
Ret. Dol lelang, Jemb darurat, Andang	45 500	68 000	185 000	211 750	350 500	669 500
Steger Werk, Perancah Bg sting &						
Direksi Keet						
Ret. Pemeriksaan kualitas susu	0	0	0	45 000	360 000	25 000
Ret. Pelayanan insimenasi buatan	0	0	0	14 000	15 000	15 250
Ret. Pelayanan kesehatan hewan	0	0	0	15 000	15 000	15 000
Ret. Pengujian & No. Kend tak brmtor	0	0	0	375	375	397.375
Ret. Pemanfaatan sarang walet	0	0	0	500	0	0
Ret. Pelayanan kesehatan swasta	0	0	0	30 000	40 000	40 000
Ret. Keur Calon Mempelai	50 000	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>15.078.875</b>	<b>18.217.288</b>	<b>24.358.627</b>	<b>36.901.387</b>	<b>32.706.518</b>	<b>31.318.364</b>



TABEL 14. Realisasi Retribusi Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008 dalam (000) Rp

Klasifikasi Jenis Retribusi	Tahun					
	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Ret. Pelayanan Kesehatan	10.822.289					
- Dinas Kesehatan Sosial (DKK)		2.951.280,8	4.116.179	4.180.574	4.014.467	3.026.927
- Badan RSU Pandan Arang		12.054.080,1	14.207.752	15.578.050	19.215.338	21.296.036
Ret. Pel Persampahan & Kebersihan	211.457,6	240.031,2	259.401	268.481	302.753	268.866
Ret. Bea Cetak KTP/KK	600.625	290.929,5	303.775	903.359	1.744.956	859.525
Ret. Bea Cetak akte capil		299.503	267.799	324.689	281.320	357.499
Ret. Pelayanan pemakaman	2.110	3.025	7.430	8.355	7.465	7.385
Ret. Parkir di tepi jalan umum	36.001	37.815	41.268	43.520	108.569	113.326
Ret. Pelayanan pasar	1.139.528,8	1.323.858,8	1.508.593	1.543.148	1.664.199	1.754.207
Ret. Pengujian kendaraan bermotor	311.093	335.256	363.010	399.419	400.975	410.948
Ret. Pemeriksaan alat pmdm kbkran	500	550	550	1.000	1.000	1.000
Ret. Pelayanan pendidikan	0	0	0	0	0	715
Ret. Pelayanan askeskin	0	0	0	0	0	0
Ret. Pasar grosir/Pertokoan	0	0	0	0	0	175.197
Ret. Js Us pmkian kekayaan daerah	466.337	645.045,7	1.710.497	8.031.850	2.280.701	2.177.207
Ret. Jasa usaha terminal	213.397,3	225.328,3	235.664	257.363	496.109	514.979
Ret. Js Us tempat khusus parkir	21.304,5	18.403,7	21.190	24.575	93.004	108.207
Ret. Js Us rumah potong hewan	502.979,5	457.068,1	496.471	482.238	399.855	387.905
Ret. Js Us tmpt rekreasi & ol raga	199.676	243.448,4	439.893	444.739	418.697	424.788
Ret. Js Us pengol limbah cair	6.877	5.827	5.251	5.409	4.869	2.365
Ret. Js Us penj prod usaha daerah	40.065,4	15.047	15.012	15.026	17.100	18.733
Ret. Ijin mendirikan bangunan (IMB)	153.293,6	328.966,2	267.157	775.447	376.813	355.370
Ret. Ijin gangguan	136.331,6	140.000	250.140	283.566	441.797	360.957
Ret. Tempat usaha				24.069	22.132	20.898
Ret. Ijin Trayek	20.535	29.575	33.340	29.271	27.375	31.260
Ret. Surat ijin usaha perdagangan	40.745	0	0	26.935	28.834	34.410
Ret. Rice mill/ijin usaha perusahaan	26.416	28.528,7	26.176	26.814	30.965	35.467
Ret. Tanda daftar perusahaan	28.965	18.210	17.760	21.295	24.373	21.480
Ret. Surat ijin perusahaan	0	24.305	19.655	10.140	7.680	6.695
Ret. Tanda daftar gudang	1.050	700	605	495	400	635
Ret. Pel AdmUnt Mend & leg nskhdns	92.797	68.710,2	67.800	69.687	40.856	17.284
Ret. Ijin Penj kayu di luar kwsan hutan	20.795,2	22.229,8	207.000	295.948	408.337	286.058
Ret. Dol lelang, Jemb darurat, Andang	119.584	294.320,4	275.919	374.169	520.715	1.047.093
Steger Werk, Perancah Bg sting&						
Direksi Keet						
Ret. Pemeriksaan kualitas susu	0	0	0	45.000	36.000	23.034
Ret. Pelayanan insimenasi buatan	0	0	0	16.716	16.252	17.934
Ret. Pelayanan kesehatan hewan	0	0	0	15.000	15.000	15.500
Ret. Pengujian & No. Kend tak brmtor	0	0	0	380	400	410.948
Ret. Pemanfaatan sarang walet	0	0	0	500	0	0
Ret. Pelayanan kesehatan swasta	0	0	0	30.000	73.762	42.187
Ret. Keur Calon Mempelai	48.556	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>15.265.695</b>	<b>20.188.984,4</b>	<b>25.165.287</b>	<b>34.580.011</b>	<b>33.523.068</b>	<b>34.633.025</b>



TABEL 15. Rasio Pengumpulan Retribusi Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008

Klasifikasi Jenis Retribusi	Tahun					
	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Ret. Pelayanan Kesehatan	98,33					
- Dinas Kesehatan Sosial (DKK)		100,64	123,51	104,83	95,43	119,09
- Badan RSU Pandan Arang		112,72	107,93	108,59	109,62	109,49
Ret. Pel Persampahan & Kebersihan	98,77	99,72	103,08	105,02	106,99	100,36
Ret. Bea Cetak KTP/KK	99,89	107,75	112,51	157,11	72,37	79,96
Ret. Bea Cetak akte capil		93,96	133,90	116,38	112,53	142,46
Ret. Pelayanan pemakaman	105,5	100,83	165,11	167,10	114,85	113,62
Ret. Parkir di tepi jalan umum	101,63	100,63	101,53	100,46	101,05	101,80
Ret. Pelayanan pasar	100,90	98,63	112,71	108,58	102,82	110,99
Ret. Pengujian kendaraan bermotor	109,43	109,13	114,56	113,76	114,20	103,42
Ret. Pemeriksaan alat pmdm kbkran	100	100	100	100	100	100
Ret. Pelayanan pendidikan	-	-	-	-	-	52,00
Ret. Pelayanan askeskin	-	-	-	-	-	-
Ret. Pasar grosir/Pertokoan	-	-	-	-	-	110,98
Ret. Js Us pmkian kekayaan daerah	134,16	141,60	49,80	62,40	81,60	118,46
Ret. Jasa usaha terminal	95,99	95,48	89,88	98,16	110,06	100,05
Ret. Js Us tempat khusus parkir	94,94	92,11	113,07	108,69	100	109,26
Ret. Js Us rumah potong hewan	104,41	93,60	111,57	103,21	105,03	84,05
Ret. Js Us tmpt rekreasi & ol raga	107,66	112,06	113,21	98,27	109,21	101,62
Ret. Js Us pengol limbah cair	136,18	105,95	105,02	89,78	80,48	67,57
Ret. Js Us penj prod usaha daerah	100,75	100,31	100,08	100,17	100,59	104,07
Ret. Ijin mendirikan bangunan (IMB)	100,48	143,26	95,77	129,86	127,42	104,52
Ret. Ijin gangguan	123,94	162,10	125,07	84,02	147,27	120,32
Ret. Tempat usaha				192,55	88,53	104,49
Ret. Ijin Trayek	168,47	169,24	157,26	115,01	107,56	122,71
Ret. Surat ijin usaha perdagangan	119,84	-	-	146,78	160,19	172,27
Ret. Rice mill/ijin usaha perusahaan	125,79	135,85	104,70	107,26	123,86	136,41
Ret. Tanda daftar perusahaan	125,93	153,80	200	146,86	174,09	143,20
Ret. Surat ijin perusahaan	-	121,53	196,55	101,20	153,60	133,90
Ret. Tanda daftar gudang	105	100	121,00	82,50	66,68	127,00
Ret. Pel AdmUnt Mend & leg nskh dns	222,56	61,87	102,93	168,79	129,93	185,85
Ret. Ijin Penj kayu di luar kwsan hutan	189,05	148,20	276,00	211,39	138,42	143,03
Ret. Dol lelang, Jemb darurat, Andang	262,82	432,82	149,15	176,70	148,56	156,40
Steger Werk, Perancah Bg sting&						
Direksi Keet						
Ret. Pemeriksaan kualitas susu	-	-	-	100	10,00	92,14
Ret. Pelayanan insimenasi buatan	-	-	-	119,40	108,35	117,60
Ret. Pelayanan kesehatan hewan	-	-	-	100	100	103,33
Ret. Pengujian & No. Kend tak brmtor	-	-	-	101,33	106,67	103,42
Ret. Pemanfaatan sarang walet	-	-	-	221,80	-	-
Ret. Pelayanan kesehatan swasta	-	-	-	173,92	184,41	105,47
Ret. Keur Calon Mempelai	97,11	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>101,24</b>	<b>110,82</b>	<b>103,31</b>	<b>93,71</b>	<b>102,50</b>	<b>110,58</b>

TABEL 16. Pertumbuhan Retribusi Kabupaten Boyolali Tahun 2003-2008

Klasifikasi Jenis Retribusi	2003	2004	2005	Tahun 2006	2007	2008	Rerata
Ret. Pelayanan Kesehatan	38,65						23,97
- Dinas Kesehatan Sosial (DKK)		39,47	1,56	(3,97)	(24,59)	9,47	
- Badan RSU Pandan Arang		17,87	9,64	23,35	10,83	13,18	
Ret. Pel Persampahan & Kebersihan	13,51	8,07	3,50	12,76	(11,19)	4,40	5,17
Ret. Bea Cetak KTP/KK	(1,69)	4,41	197,38	93,16	(50,74)	36,10	50,57
Ret. Bea Cetak akte capil		(10,58)	21,24	(13,36)	27,08	0,41	
Ret. Pelayanan pemakaman	43,36	145,62	12,45	(10,65)	(1,07)	40,08	38,29
Ret. Parkir di tepi jalan umum	5,04	9,13	5,46	149,47	4,38	(49,09)	20,73
Ret. Pelayanan pasar	16,17	13,95	2,29	7,84	5,41	4,86	8,42
Ret. Pengujian kendaraan bermotor	7,77	8,28	10,03	0,39	2,49	7,86	4,84
Ret. Pemeriksaan alat pmdm kbkran	10	0	45	0	0	25	13,33
Ret. Pelayanan pendidikan	0	0	0	0	0	108,39	18,06
Ret. Pelayanan askeskin	0	0	0	0	0	0	0
Ret. Pasar grosir/Pertokoan	0	0	0	0	0	7,70	1,28
Ret. Js Us pmkian kekayaan daerah	38,32	165,17	369,56	(71,60)	(4,54)	(2,88)	82,37
Ret. Jasa usaha terminal	5,59	4,59	9,21	92,77	3,80	2,45	19,73
Ret. Js Us tempat khusus parkir	(13,61)	15,14	13,77	278,45	16,35	(22,36)	47,96
Ret. Js Us rumah potong hewan	(9,13)	8,62	(2,87)	(17,08)	(2,99)	(4,64)	(4,68)
Ret. Js Us tmpt rekreasi & olahraga	21,92	80,69	1,10	(5,85)	1,45	11,42	18,45
Ret. Js Us pengol limbah cair	(15,27)	(9,88)	3,01	(9,98)	(51,43)	7,57	(10,12)
Ret. Js Us penj prod usaha daerah	(62,44)	(0,23)	0,09	13,80	9,55	33,75	(0,91)
Ret. Ijin mendirikan bangunan (IMB)	114,59	(18,79)	190,26	(51,41)	(5,69)	(4,02)	37,49
Ret. Ijin gangguan	2,69	78,67	13,36	55,80	(18,29)	15,13	24,56
Ret. Tempat usaha				(8,75)	(5,57)	53,09	6,46
Ret. Ijin Trayek	44,02	12,73	(13,90)	(6,93)	14,19	(10,11)	(0,67)
Ret. Surat ijin usaha perdagangan	0	0	0	7,05	19,34	10,53	6,15
Ret. Rice mill/ijin usaha perusahaan	7,10	(8,25)	2,38	15,48	14,54	(19,44)	0,78
Ret. Tanda daftar perusahaan	(37,13)	(2,47)	19,90	14,45	(11,87)	21,11	6,85
Ret. Surat ijin perusahaan	0	(19,13)	(48,41)	(24,26)	(12,81)	3,53	(16,85)
Ret. Tanda daftar gudang	(33,33)	(13,57)	(22,22)	(23,75)	58,75	233,86	38,84
Ret. Pel AdmUnt Mend & leg nskh dns	(25,96)	(1,32)	2,71	(41,37)	(56,37)	(46,67)	(23,84)
Ret. Ijin Penj kayu di luar kwsan hutan	6,89	831,18	42,97	37,97	(29,94)	7,52	149,43
Ret. Dol lelang, Jemb darurat, Andang	146,12	(6,25)	35,61	39,16	101,09	(33,64)	22,66
Steger Werk, Perancah Bgsting & Direksi Keet							
Ret. Pemeriksaan kualitas susu	0	0	0	-25	(36,02)	8,53	(8,75)
Ret. Pelayanan insimenasi buatan	0	0	0	(2,77)	10,35	27,77	5,89
Ret. Pelayanan kesehatan hewan	0	0	0	0	3,33	(1,29)	0,34
Ret. Pengujian & No. Kend tak brmtor	0	0	0	5	102,637	0	17,107
Ret. Pemanfaatan sarang walet	0	0	0	0	0	0	0
Ret. Pelayanan kesehatan swasta	0	0	0	145,87	(42,81)	(28,95)	12,35
<b>Jumlah</b>	<b>32,25</b>	<b>24,65</b>	<b>37,41</b>	<b>(3,06)</b>	<b>3,31</b>	<b>12,49</b>	<b>9,57</b>

**TABEL 17. Proporsi Retribusi Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008**

[illegible]

TABEL 18. Mariks Potensi Retribusi Kabupaten Boyolali

Jenis Retribusi	Pertumbuhan	Proporsi/Kontribusi	Pert Ret/Pert tot Ret	Prop Ret/Rerat
Ret. Pelayanan Kesehatan				
- Dinas Kesehatan Sosial (DKK)	9,47	8,50	0,76	3,3
- Badan RSUD Pandan Arang	13,18	61,87	1,05	24,1
Ret. Pel Persampahan & Kebersihan	4,40	0,72	0,35	0,2
Ret. Bea Cetak KTP/KK	36,10	3,00	2,89	1,1
Ret. Bea Cetak akte capil	0,41	0,92	0,03	0,3
Ret. Pelayanan pemakaman	40,08	0,03	3,21	0,0
Ret. Parkir di tepi jalan umum	(49,09)	0,15	(3,93)	0,0
Ret. Pelayanan pasar	4,86	4,72	0,39	1,8
Ret. Pengujian kendaraan bermotor	7,86	1,14	0,63	0,4
Ret. Pemeriksaan alat pmdm kbkran	25	0,32	2,00	0,1
Ret. Pelayanan pendidikan	108,39	0,38	8,68	0,1
Ret. Pelayanan askeskin	0	4,03	0	1,5
Ret. Pasar grosir/Pertokoan	7,70	0,48	0,62	0,1
Ret. Js Us pmkian kekayaan daerah	(2,88)	5,43	(0,23)	2,1
Ret. Jasa usaha terminal	2,45	1,35	0,20	0,5
Ret. Js Us tempat khusus parkir	(22,36)	0,21	(1,79)	0,0
Ret. Js Us rumah potong hewan	(4,64)	0,95	(0,37)	0,3
Ret. Js Us tmpt rekreasi & ol raga	11,42	1,21	0,91	0,4
Ret. Js Us pengol limbah cair	7,57	0,65	0,61	0,2
Ret. Js Us penj prod usaha daerah	33,75	0,06	2,70	0,0
Ret. Ijin mendirikan bangunan (IMB)	(4,02)	0,87	(0,32)	0,3
Ret. Ijin gangguan	15,13	1,07	1,21	0,4
Ret. Tempat usaha	53,09	0,08	4,25	0,0
Ret. Ijin Trayek	(10,11)	0,07	(0,81)	0,0
Ret. Surat ijin usaha perdagangan	10,53	0,09	0,84	0,0
Ret. Rice mill/ijin usaha perusahaan	(19,44)	0,07	(1,56)	0,0
Ret. Tanda daftar perusahaan	21,11	0,07	1,69	0,0
Ret. Surat ijin perusahaan	3,53	0,02	0,28	0,0
Ret. Tanda daftar gudang	233,86	0,54	18,72	0,2
Ret. Pel AdmUnt Mend & leg nskh dns	(46,67)	0,02	(3,74)	0,0
Ret. Ijin Penj kayu di luar kwsan hutan	7,52	0,79	0,60	0,3
Ret. Dol lelang, Jemb darurat, Andang	(33,64)	1,78	(2,69)	0,6
Steger Werk, Perancah Bgsting & Direksi Keet				
Ret. Pemeriksaan kualitas susu	8,53	0,06	0,68	0,0
Ret. Pelayanan insimenasi buatan	27,77	0,06	2,22	0,0
Ret. Pelayanan kesehatan hewan	(1,29)	0,04	(0,10)	0,0
Ret. Pengujian & No. Kend tak brmtor	0	0	0	
Ret. Pemanfaatan sarang walet	0	0	0	
Ret. Pelayanan kesehatan swasta	(28,95)	0,08	(2,32)	0,0
	<b>12,49</b>	<b>2,56</b>		



TABEL 19. Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Boyolali

Tahun	PAD	Bantuan+Sumb+Pinj	Rs. Kemandirian %	Kemandirian Keu	Pola Hubungan
2002	24.460.325.825	279.387.824.975	8,75	Rendah Sekali	Instruktif
2003	32.781.305.308	340.087.467.578	9,64	Rendah Sekali	Instruktif
2004	36.970.682.463	346.693.462.480	10,66	Rendah Sekali	Instruktif
2005	49.816.906.083	366.296.793.541	13,60	Rendah Sekali	Instruktif
2006	59.307.283.906	543.881.332.165	10,90	Rendah Sekali	Instruktif
2007	67.437.551.010	608.136.484.123	11,09	Rendah Sekali	Instruktif
2008	63.733.408.461	683.877.502.559	9,32	Rendah Sekali	Instruktif
Rerata			10,56	Rendah Sekali	Instruktif

TABEL 20. Jumlah Kumulatif Pokok Pinjaman Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008

Pos APBD	2002	2003	2004	2005	2006
Total Penerimaan	325.257.089.102	389.246.882.291	403.049.052.311	439.245.327.765	630.290.000.000
DAK/Subsidi	13.694.386.000	5.500.000.000	6.920.000.000	11.710.000.000	24.930.000.000
Dana Darurat	0	0	0	0	0
Penerimaan Umum	311.562.703.102	383.746.882.291	396.129.052.311	427.535.327.765	605.360.000.000
Jml Pk Pinj Lama Yg Blm Dibayar	546.845.906	503.989.801	503.098.234	415.602.887	371.000.000
Jml Pk Pinj Yg Dtrima Pd Thn Tsb	-	-	-	-	213.000.000
Kapasitas Pinjaman %	-	0,16	0,13	0,10	0,1

TABEL 21. Kapasitas Pinjaman Daerah (DSCR) Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008

Pos APBD	Tahun				
	2002	2003	2004	2005	2006
PAD	24.460.325.825	32.781.305.308	36.970.682.463	49.816.906.083	59.307.283.906
Bagian Daerah	21.408.938.302	16.378.109.405	19.384.907.368	23.131.628.141	27.101.000.000
DAU	250.940.368.750	292.070.000.000	303.635.353.000	313.078.000.000	492.181.000.000
Belanja Wajib	247.808.493.200	289.962.029.300	325.300.656.600	427.606.545.800	422.906.000.000
Bunga + Biaya Lain yg Jatuh Tempo	118.025.754	43.747.674	43.747.672	43.747.673	45.000.000
DSCR	415,17	1.171,89	792,96	(-) 950	3

**TABEL 22. Jumlah Maksimal Angsuran Pokok Pinjaman Kabupaten Boyolali Tahun 2002-2008**

Pos APBD	Tahun				
	2002	2003	2004	2005	2006
D	24.460.325.825	32.781.305.308	36.970.682.463	49.816.906.083	59.307.283.9
ian Daerah	21.408.938.302	16.378.109.405	19.384.907.368	23.131.628.141	27.101.496.7
J	250.940.368.750	292.070.000.000	303.635.353.000	313.078.000.000	492.181.000.0
anja Wajib	247.808.493.200	289.962.029.300	325.300.656.600	427.606.545.800	422.906.760.8
DR Minimal	2,5	2,5	2,5	2,5	2
ksimal Angsuran Pokok Pinj	19.600.455.850	20.506.954.160	13.876.114.490	Tdk Bs Meminjam	62.273.207.9

